

**PERANAN ELIT INFORMAL DALAM
PEMBANGUNAN DESA.**

**(STUDI DI DESA WONOSARI KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN).**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**INDRA KURNIAWAN
NIM. 0110310043**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2008**

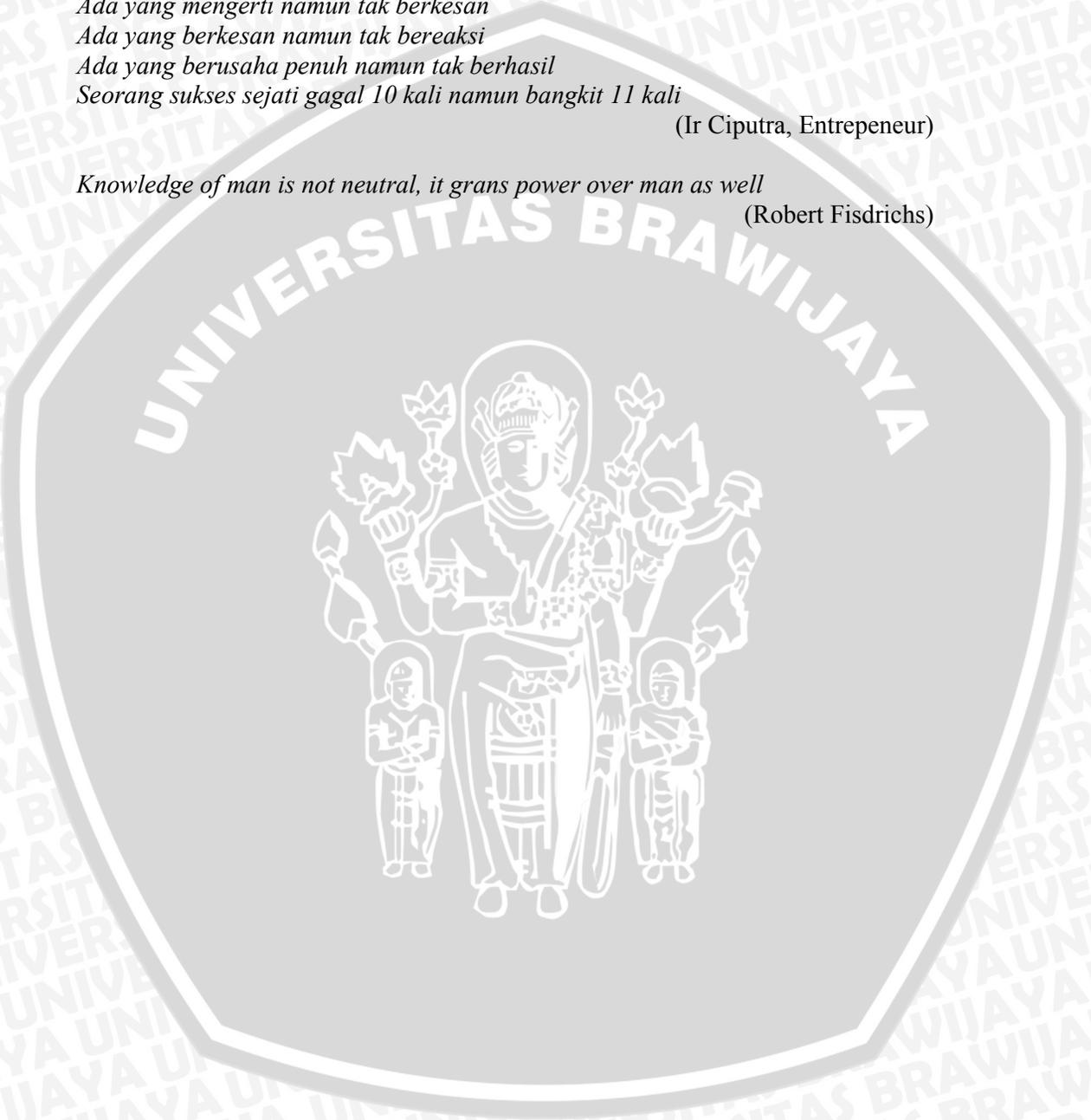
MOTTO

*Ada yang melihat namun tak berfikir
Ada yang berfikir namun tak mengerti
Ada yang mengerti namun tak berkesan
Ada yang berkesan namun tak bereaksi
Ada yang berusaha penuh namun tak berhasil
Seorang sukses sejati gagal 10 kali namun bangkit 11 kali*

(Ir Ciputra, Entrepreneur)

Knowledge of man is not neutral, it grants power over man as well

(Robert Fisdrichs)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PERANAN ELIT INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN
DESA.

(STUDI DI DESA WONOSARI KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN).

Disusun oleh : INDRA KURNIAWAN

NIM : 0110310043

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, 13 Maret 2009

Komisi pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Soewondo, MS
NIP. 130 890 050

Drs. Minto hadi, MS
NIP. 130 936 636

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 8 agustus 2008

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Indra Kurniawan

Judul : Peranan Elit Informal dalam Pembangunan Desa
(Studi di Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Drs. Soewondo, MS
NIP. 130 890 050

Drs. Minto hadi, MS
NIP. 130 936 636

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Supriyono MSi
NIP. 131 573 954

Drs. Sukanto, MSi
NIP. 131 573 955

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

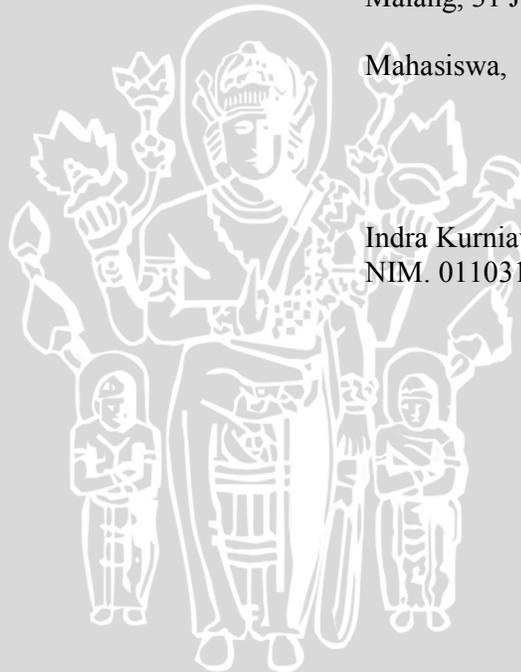
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan, dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 31 Juli 2008

Mahasiswa,

Indra Kurniawan
NIM. 0110310043



RINGKASAN

Kurniawan, Indra. 2008. **Peranan Elit Informal dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan).**

Pembimbing: (1) Drs. Soewondo, MS, (2) Drs. Minto Hadi, MS.

Proses pembangunan desa sangat membutuhkan peranan dan partisipasi, serta kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, yang di dalamnya ada keterpaduan kepentingan dan kebutuhan. Namun pada prosesnya kerja sama yang diharapkan belum berjalan sebagaimana mestinya, disinyalir pada kesenjangan visi dan kepentingan. Dalam hubungan dengan kenyataan bahwa pembangunan desa di Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan belum berhasil dengan baik oleh karena dukungan partisipasi masyarakat masih bersifat mobilisasi, sementara di desa ada kelompok elit informal, seperti tokoh agama (alim ulama) sesepuh adat, dan pedagang-pengusaha berpengaruh, dimana keberadaan mereka dalam masyarakat sering dijadikan panutan dan ukuran dalam suatu keberhasilan. Kendati diketahui bahwa posisi dan eksistensi elit informal sangat menentukan yaitu dengan kontribusi mereka dalam kegiatan-kegiatan tertentu, namun proses pembangunan desa masih dapat dikatakan belum berhasil dengan baik. Dan hal itu memerlukan jawaban serta penyelesaian yang disesuaikan dengan kelebihan pada masing-masing elit informal serta pola kehidupan masyarakat setempat. Untuk itu berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas perlu diteliti sebagai upaya untuk mendeskripsikan peranan mereka dalam pembangunan desa, seyogyanya pengaruh mereka dapat dimanfaatkan sebagai potensi penggerak partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan desa.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan elit informal dalam pembangunan desa yang dilaksanakan. Tulisan ini juga dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi elit informal setempat agar potensi dan peranan mereka selalu diarahkan pada upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, di samping elit formal (pemerintah). Hasil penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan kontribusi akademis yang bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, berupa konsep yang berkaitan dengan eksistensi dan peranan elit informal dalam pembangunan desa. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa setempat agar lebih menjalin hubungan kemitraan dengan elit informal dan memanfaatkan keikutsertaannya dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui penggambaran dan menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya. Sehingga dapat dipergunakan untuk menggambarkan peran elit informal dalam pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tuter Nongkojajar Kabupaten Pasuruan.

Setelah dilaksanakan penelitian dapat diperoleh hasil dalam bentuk tulisan ini yang mana di dalamnya diperoleh pula kesimpulan bahwa elit informal di Desa Wonosari melakukan peranannya dengan baik dalam bidang tertentu dimana mereka berkompeten di dalamnya. Dalam artian tiap-tiap elit informal bekerjasama dengan Pemerintah Desa menjalankan peranannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari situ tercipta gambaran bahwa telah terjadi kerja sama yang baik antara elit informal dan Pemerintah Desa Wonosari. Sementara itu saran yang dapat penulis berikan adalah agar Pemerintah Desa lebih jeli dalam memahami potensi dan kelebihan-kelebihan tiap-tiap elit informal dalam bidang apakah sesungguhnya mereka berkompeten, sehingga hubungan kemitraan yang terjalin benar-benar efektif dan efisien.



SUMMARY

Kurniawan, Indra. 2008. **The Roles of Informal Elite against Development of Countryside. (Study at Countryside of Wonosari District Tatur Sub-province of Pasuruan).**

Pembimbing: (1) Drs. Soewondo, MS, (2) Drs. Minto Hadi, MS.

The development of countryside process needs very much roles and participations, also cooperation between government and society, where there is integrity of importance and needs inside. But on its process, the expected cooperation is not yet ran properly, it is estimated at difference of vision and importance. Concern with facts that the development of countryside at Countryside of Wonosari District Tatur Sub-province of Pasuruan not yet succeeded better, because society participation support still have the character of mobilization, while in countryside there is informal elite group, like religion figure (clergy), custom doyen, and merchant-entrepreneur which have an effect on, where existence of them in society is often made to be peer and standard of an efficacy. Even known that position and existence of informal elite very determining that is with their contribution in certain activities, but development of countryside process admit to be told not yet succeeded better. And that thing needs answer and also the solving of which is adapted by excess at each of informal elite and also pattern life of local society. For that pursuant to problems which have been explained above require to be observed as effort for describe their roles in development of countryside, properly their influence earn to be exploited as activator potency of society participation for the success of development of countryside.

While target which wish to be reached with implementation of this research is to describe the roles of informal elite against development of executed countryside. This masterpiece writing is also meant to be gives contribution as input to local informal elite in order to their potency and roles always aimed at effort entangle society in development of countryside, beside formal elite (government). Result of this research is expected to earn also give worthwhile academic contribution to Faculty of Administrative Science Brawijaya University, in the form of concept related to existence and roles of informal elite against development of countryside. As input to Local Government and Government of local Countryside in order to do more braiding of partner relation with informal elite and exploiting their participation in every step of countryside development.

In this research, use descriptive qualitative method, that is passing depiction and elaborate real situation based on happened fact and try to look for its resolving. So that can be utilized to describe roles of informal elite against development of Countryside, at Countryside of Wonosari District Tatur Sub-province of Pasuruan.

After executed research can be obtain result in the form of this writing, which is in it obtained also conclusion that informal elite at Countryside of

Wonosari done their roles better in the field of certain where their competence. Its mean every informal elite work along with Government of Countryside run their roles as according to their each area. From that condition create depiction that have happened good cooperation between Governmental and informal elites of Countryside of Wonosari. Meanwhile suggestion which writer able to gave is in order to Government of Countryside more brooding in comprehending excess and potency of every informal elite in the field of whether in fact they have competence, so that partner relation/ which braided is really effective and efficient.

PERANAN ELIT INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN DESA.

**(STUDI DI DESA WONOSARI KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN).**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**INDRA KURNIAWAN
NIM. 0110310043**

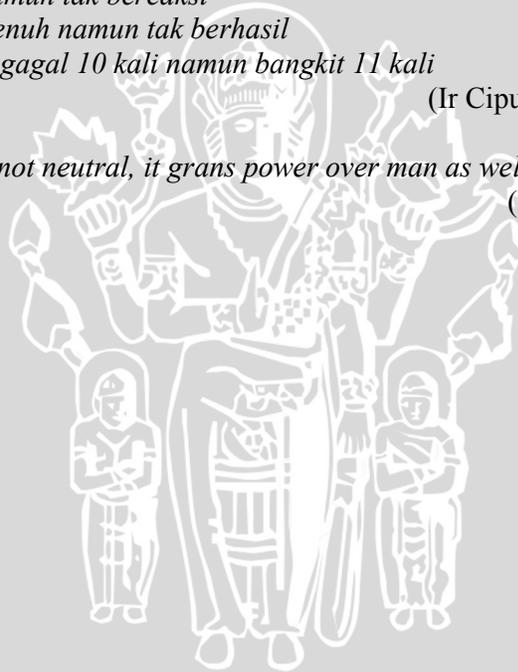


UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2008

MOTTO

*Ada yang melihat namun tak berfikir
Ada yang berfikir namun tak mengerti
Ada yang mengerti namun tak berkesan
Ada yang berkesan namun tak bereaksi
Ada yang berusaha penuh namun tak berhasil
Seorang sukses sejati gagal 10 kali namun bangkit 11 kali*
(Ir Ciputra, Entrepreneur)

Knowledge of man is not neutral, it grants power over man as well
(Robert Fisdrichs)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PERANAN ELIT INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN
DESA.

(STUDI DI DESA WONOSARI KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN).

Disusun oleh : INDRA KURNIAWAN

NIM : 0110310043

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, 13 Maret 2009

Komisi pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Soewondo, MS
NIP. 130 890 050

Drs. Minto hadi, MS
NIP. 130 936 636

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 8 agustus 2008

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Indra Kurniawan

Judul : Peranan Elit Informal dalam Pembangunan Desa
(Studi di Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Drs. Soewondo, MS
NIP. 130 890 050

Drs. Minto hadi, MS
NIP. 130 936 636

Anggota

Dr. Bambang Supriyono MSi
NIP. 131 573 954

Anggota

Drs. Sukanto, MSi
NIP. 131 573 955

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan, dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 31 Juli 2008

Mahasiswa,

Indra Kurniawan
NIM. 0110310043

RINGKASAN

Kurniawan, Indra. 2008. **Peranan Elit Informal dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)**. Pembimbing: (1) Drs. Soewondo, MS, (2) Drs. Minto Hadi, MS.

Proses pembangunan desa sangat membutuhkan peranan dan partisipasi, serta kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, yang di dalamnya ada keterpaduan kepentingan dan kebutuhan. Namun pada prosesnya kerja sama yang diharapkan belum berjalan sebagaimana mestinya, disinyalir pada kesenjangan visi dan kepentingan. Dalam hubungan dengan kenyataan bahwa pembangunan desa di Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan belum berhasil dengan baik oleh karena dukungan partisipasi masyarakat masih bersifat mobilisasi, sementara di desa ada kelompok elit informal, seperti tokoh agama (alim ulama) sesepuh adat, dan pedagang-pengusaha berpengaruh, dimana keberadaan mereka dalam masyarakat sering dijadikan panutan dan ukuran dalam suatu keberhasilan. Kendati diketahui bahwa posisi dan eksistensi elit informal sangat menentukan yaitu dengan kontribusi mereka dalam kegiatan-kegiatan tertentu, namun proses pembangunan desa masih dapat dikatakan belum berhasil dengan baik. Dan hal itu memerlukan jawaban serta penyelesaian yang disesuaikan dengan kelebihan pada masing-masing elit informal serta pola kehidupan masyarakat setempat. Untuk itu berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas perlu diteliti sebagai upaya untuk mendeskripsikan peranan mereka dalam pembangunan desa, seyogyanya pengaruh mereka dapat dimanfaatkan sebagai potensi penggerak partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan desa.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan elit informal dalam pembangunan desa yang dilaksanakan. Tulisan ini juga dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi elit informal setempat agar potensi dan peranan mereka selalu diarahkan pada upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, di samping elit formal (pemerintah). Hasil penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan kontribusi akademis yang bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, berupa konsep yang berkaitan dengan eksistensi dan peranan elit informal dalam pembangunan desa. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa setempat agar lebih menjalin

hubungan kemitraan dengan elit informal dan memanfaatkan keikutsertaannya dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui penggambaran dan menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya. Sehingga dapat dipergunakan untuk menggambarkan peran elit informal dalam pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tuter Nongkojajar Kabupaten Pasuruan.

Setelah dilaksanakan penelitian dapat diperoleh hasil dalam bentuk tulisan ini yang mana di dalamnya diperoleh pula kesimpulan bahwa elit informal di Desa Wonosari melakukan peranannya dengan baik dalam bidang tertentu dimana mereka berkompeten di dalamnya. Dalam artian tiap-tiap elit informal bekerjasama dengan Pemerintah Desa menjalankan peranannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari situ tercipta gambaran bahwa telah terjadi kerja sama yang baik antara elit informal dan Pemerintah Desa Wonosari. Sementara itu saran yang dapat penulis berikan adalah agar Pemerintah Desa lebih jeli dalam memahami potensi dan kelebihan-kelebihan tiap-tiap elit informal dalam bidang apakah sesungguhnya mereka berkompeten, sehingga hubungan kemitraan yang terjalin benar-benar efektif dan efisien.



SUMMARY

Kurniawan, Indra. 2008. **The Roles of Informal Elite against Development of Countryside. (Study at Countryside of Wonosari District Tatur Sub-province of Pasuruan).**

Pembimbing: (1) Drs. Soewondo, MS, (2) Drs. Minto Hadi, MS.

The development of countryside process needs very much roles and participations, also cooperation between government and society, where there is integrity of importance and needs inside. But on its process, the expected cooperation is not yet ran properly, it is estimated at difference of vision and importance. Concern with facts that the development of countryside at Countryside of Wonosari District Tatur Sub-province of Pasuruan not yet succeeded better, because society participation support still have the character of mobilization, while in countryside there is informal elite group, like religion figure (clergy), custom doyen, and merchant-entrepreneur which have an effect on, where existence of them in society is often made to be peer and standard of an efficacy. Even known that position and existence of informal elite very determining that is with their contribution in certain activities, but development of countryside process admit to be told not yet succeeded better. And that thing needs answer and also the solving of which is adapted by excess at each of informal elite and also pattern life of local society. For that pursuant to problems which have been explained above require to be observed as effort for describe their roles in development of countryside, properly their influence earn to be exploited as activator potency of society participation for the success of development of countryside.

While target which wish to be reached with implementation of this research is to describe the roles of informal elite against development of executed countryside. This masterpiece writing is also meant to be gives contribution as input to local informal elite in order to their potency and roles always aimed at effort entangle society in development of countryside, beside formal elite (government). Result of this research is expected to earn also give worthwhile academic contribution to Faculty of Administrative Science Brawijaya University, in the form of concept related to existence and roles of informal elite against development of countryside. As input to Local Government and Government of local Countryside in order to do more braiding of partner relation with informal elite and exploiting their participation in every step of countryside development.

In this research, use descriptive qualitative method, that is passing depiction and elaborate real situation based on happened fact and try to look for its resolving. So that can be utilized to describe roles of informal elite against development of Countryside, at Countryside of Wonosari District Tatur Sub-province of Pasuruan.

After executed research can be obtain result in the form of this writing, which is in it obtained also conclusion that informal elite at Countryside of Wonosari done their roles better in the field of certain where their competence. Its mean every informal elite work along with Government of Countryside run their roles as according to their each area. From that condition create depiction that have happened good cooperation between Governmental and informal elites of Countryside of Wonosari. Meanwhile suggestion which writer able to gave is in order to Government of Countryside more brooding in comprehending excess and potency of every informal elite in the field of whether in fact they have competence, so that partner relation/ which braided is really effective and efficient.



L e m b a r P e r s e m b a h a n

Karya ini
kupersembahkan untuk:

- Ibu & Ayah tercinta
- D'windah & D'Aldy tersayang
(Maaf, maaf, & maaf telah terlalu lama tertunda)
- My sweetheart nENG aChunk
(The only person who I really want to be with, the reason of my resureaction)
- Best of the best brotherhood
Gagut - Ifa - Zaid - Udin
(Matur nuwun sembah sanget, motivasi & rasan-rasan kalian luar biasa panas, aku koyo dipecuti)
- Sedulur sak Dinoyo
Teguh - Christ - Anas - Tiar - Samson
(Suwun rek yo 2 tahun kontrakan diskon 100%)
- The others also pray me
Fani Iparku - Candra - Yogi - Mohan - Tjung - Agung
Asfi - Dodik - Rina - Faisal - Nayla - **Baba** - Umi'
Aulia' - Aconk - Mami Tut - Pak Pen - Dani - Temon
Ibu'x Temon - Gufron - Muja - **Mas Wawan** - Cuzna Ita'
Ayib - Dika - Wiwin - Marsal - Hendrik - Hasan
Danis - Didi - Adam - Iwan - Mbak Jum - Ana Arsitek
Pak Inggi Brojo - Pak Maryono - Mas Supri
Mama Menik - Pak Budi - Bayu - Martha - Hadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Drs. Soewondo, MS selaku pembimbing utama, dan Bapak Drs. Minto Hadi, MS selaku pembimbing kedua.

Bapak Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, PH.d, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.

Bapak Teguh Suwandono selaku Sekretaris Camat Tutur.

Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Desa Wonosari.

Rekan-rekan Publik angkatan 2001 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ibu dan Ayah terkasih atas dorongan, kesabaran yang luar biasa, dan doa yang tulus ikhlas selama penulis menuntut ilmu.

Sahabat-sahabat dan kekasih yang menginspirasi, membantu, dan mendoakanku selama pembuatan skripsi ini.

Malang, 1 September 2008
Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT penguasa sekalian alam semesta seisinya, sehingga sampai juga penulis pada titik kenikmatan luar biasa dengan terselesaikannya tugas berat ini.

Sholawat dan salam kepada Muhammad Rosulullah SAW, sang pangeran penuh kasih bertasbihkan cahaya terang benderang yang menyibak tabir kegelapan peradaban manusia. Sholli'ala Muhammad.

Besar harapan kami agar SKRIPSI ini dapat bermanfaat kepada masyarakat, Pemerintah Desa, dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam penyusunan SKRIPSI ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi yang kuat dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Drs. Soewondo, MS dan Bapak Drs. Minto Hadi, MS.
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi dan Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Sekretaris Kecamatan Tuter, Kepala Desa Wonosari, tokoh-tokoh masyarakat, dan rekan-rekan pemuda Nongkojajar Youth Wonosari.
4. Seluruh keluarga yang selalu memberikan bimbingan, kesabaran, dan doa.
5. Sahabat-sahabat baik jauh maupun dekat, rekan-rekan di FIA Publik, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan di sini.

Pada akhirnya penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak. Atas perhatiannya penulis menyampaikan terima kasih banyak.

Malang, 31 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PERSSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Peranan Elit Informal	8
1. Elit Informal	9
2. Macam dan Peranan Elit	12
3. Ciri-ciri dan Saluran Elit dalam Masyarakat Pedesaan	13
B. Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan ...	15
1. Pembangunan Penyempurnaan Administrasi Negara	16
2. Penyempurnaan Administrasi bagi Penyelenggaraan Proses Pembangunan	16
C. Program Pembangunan Desa	17
1. Pengertian Program	17
2. Pembangunan Desa	19
3. Pelaksanaan Pembangunan	21
D. Peranan Elit dalam Pembangunan Desa	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	27
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	28
D. Sumber dan Jenis Data	29
E. Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian	29
G. Analisa Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

PENYAJIAN DATA 32

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 32

1. Kondisi Geografis 32
2. Kependudukan 33
3. Pemerintahan Desa 35
4. Pembangunan Desa 39
5. Sosial Kemasyarakatan 41

B. Eksistensi Elit Informal dalam Masyarakat 43

C. Peranan Elit Informal dalam Pembangunan Desa 44

1. Penentuan Arah Pembangunan Desa 46
 - a. Elit Politik 46
 - b. Elit Cendekiawan 48
 - c. Elit Pemuda 49
 - d. Elit Ekonomi 50
2. Pemecahan Permasalahan Pembangunan Desa 51
 - a. Elit Politik 52
 - b. Elit Cendekiawan 52
 - c. Elit Pemuda 54
 - d. Elit Ekonomi 55
3. Pelaksanaan Kegiatan Desa 56
 - a. Elit Politik 56
 - b. Elit Cendekiawan 57
 - c. Elit Pemuda 58
 - d. Elit Ekonomi 60
4. Bantuan Material Elit Informal 60
 - a. Elit Politik 61
 - b. Elit Cendekiawan 62
 - c. Elit Pemuda 63
 - d. Elit Ekonomi 63

ANALISA DATA 64

1. Penentuan Arah Pembangunan Desa 65
 - a. Elit Politik 65
 - b. Elit Cendekiawan 66
 - c. Elit Pemuda 67
 - d. Elit Ekonomi 68
2. Pemecahan Permasalahan Pembangunan Desa 70
 - a. Elit Politik 70
 - b. Elit Cendekiawan 71
 - c. Elit Pemuda 72
 - d. Elit Ekonomi 73
3. Pelaksanaan Kegiatan Desa 74
 - a. Elit Politik 74
 - b. Elit Cendekiawan 75
 - c. Elit Pemuda 76
 - d. Elit Ekonomi 77



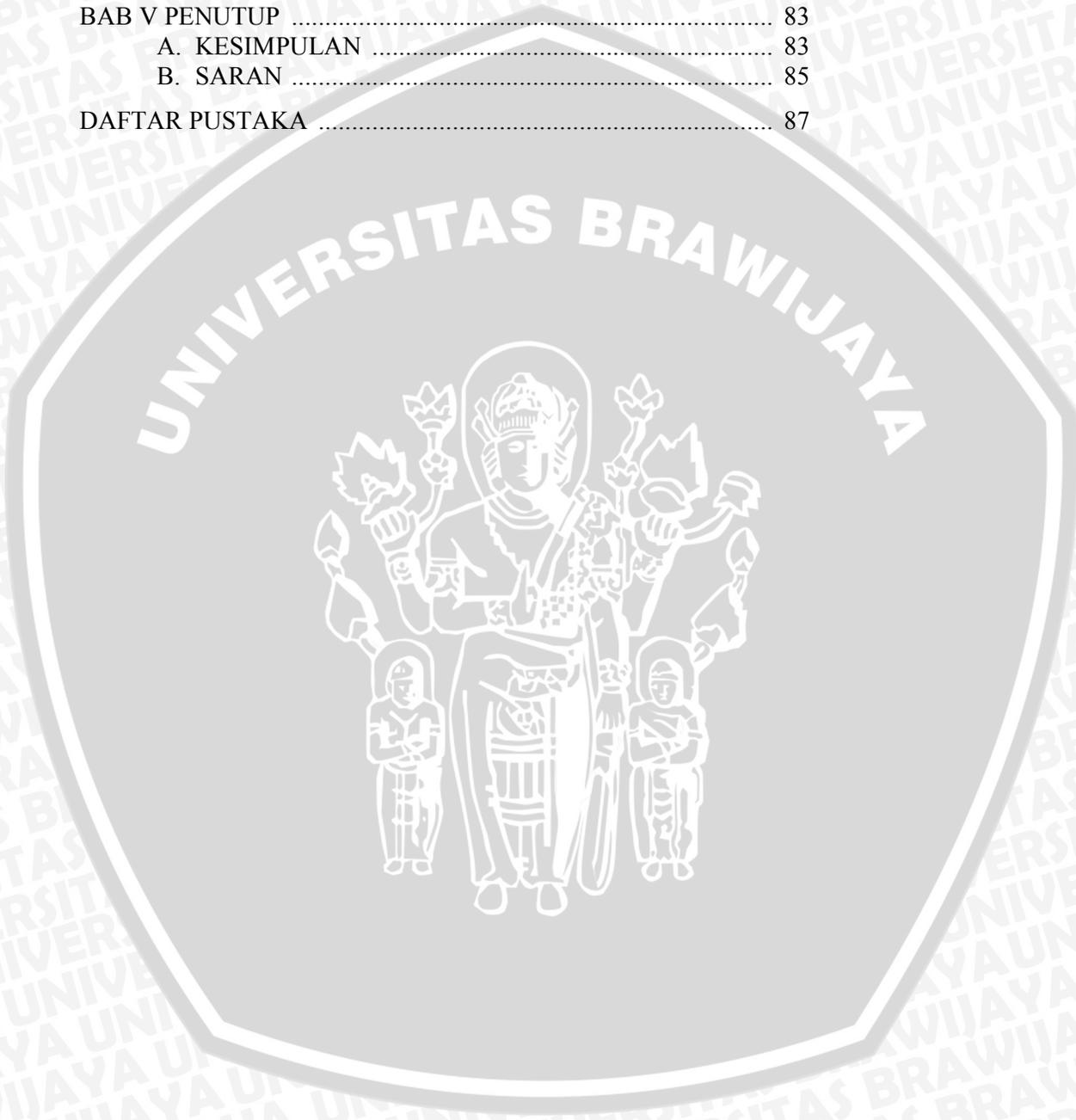
4. Bantuan Material Elit Informal 78
a. Elit Politik 78
b. Elit Cendekiawan 80
c. Elit Pemuda 80
d. Elit Ekonomi 81

BAB V PENUTUP 83

A. KESIMPULAN 83

B. SARAN 85

DAFTAR PUSTAKA 87



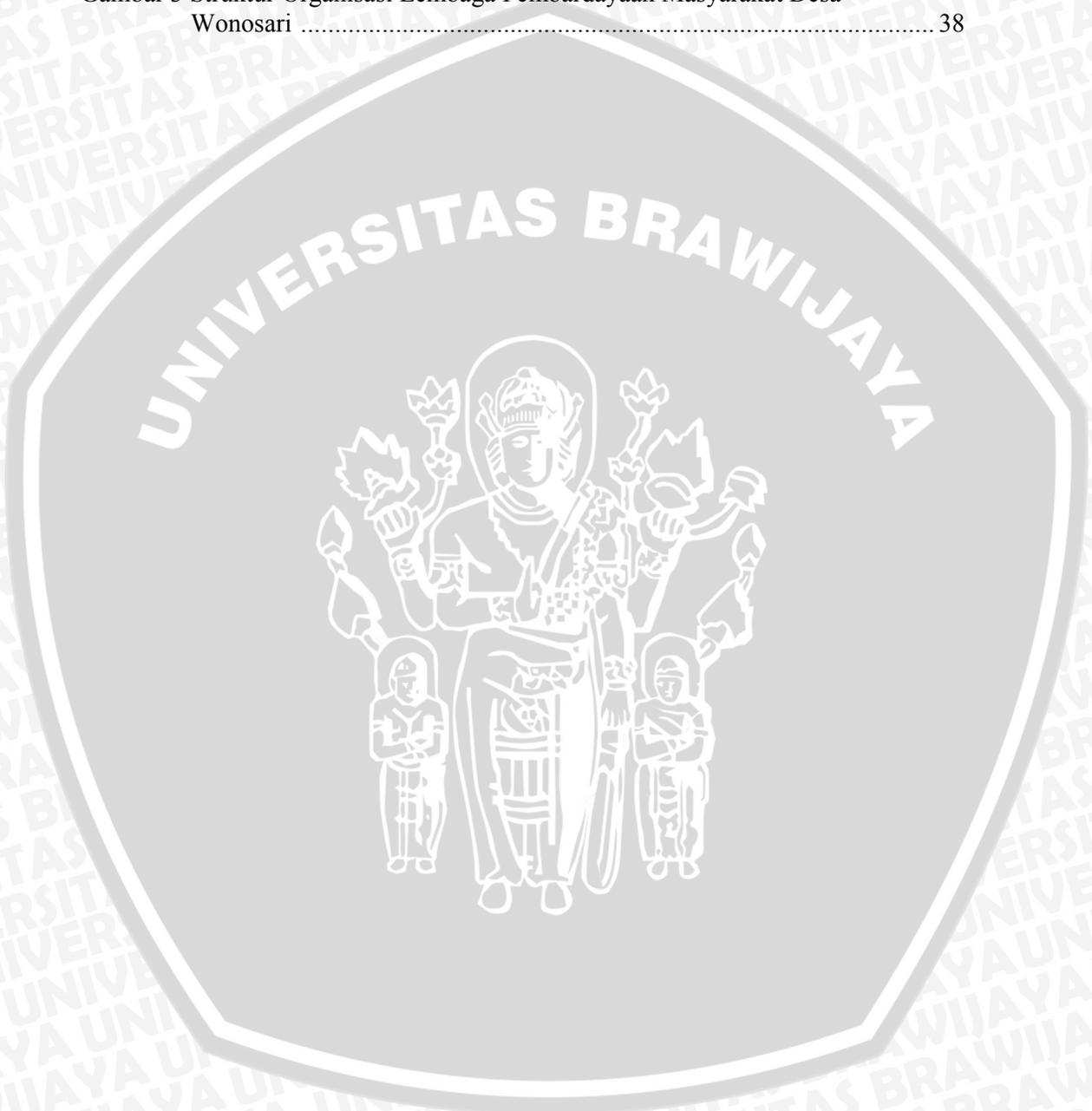
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Desa Wonosari Berdasarakan Kelompok Umur	33
Tabel 2	Penduduk Desa Wonosari Berdasarakan Peekerjaan	33
Tabel 3	Penduduk Desa Wonosari Berdasarakan Agama	34
Tabel 4	Penduduk Desa Wonosari Berdasarakan Pendidikan	34
Tabel 5	Daftar Nama Perangkat Desa Wonosari	36
Tabel 6	Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Wonosari	37
Tabel 7	Daftar Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari	38
Tabel 8	Proyek Pembangunan Fisik Desa Wonosari dalam APB Desa Periode 2007	40
Tabel 9	Proyek Pembangunan Non Fisik Desa Wonosari dalam APB Desa Periode 2007	40
Tabel 10	Sarana Pendidikan di Desa Wonosari	41
Tabel 11	Sarana Peribadatan di Desa Wonosari.....	42
Tabel 12	Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Desa Wonosari	42
Tabel 13	Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Wonosari	43
Tabel 14	Daftar Nama Elit Informal di Desa Wonosari	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonosari 35
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Wonosari 37
Gambar 3 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Wonosari 38



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini kita ketahui bahwa pelaksanaan program pembangunan yang meliputi berbagai bidang kehidupan, dengan manusia yang diposisikan sebagai subyek sekaligus sebagai obyek, ternyata mengandung potensi masalah tanpa batas yaitu adanya tuntutan mereka yang terus bertambah dan harapan yang selalu meningkat, menimbulkan dinamika dalam pembangunan, sekaligus memunculkan dilema dan tantangan yang harus dijawab. Sedangkan untuk melaksanakan program pembangunan itu sendiri sumber daya pertama dan utama adalah tenaga manusia. Diakui benar bahwa tanpa kontribusi yang disumbangkan manusia, sumber daya lainnya tidak dapat berfungsi. Setidak-tidaknya hal itulah yang menjadi alasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) selalu menggariskan hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Sudah tentu landasan yang paling penting dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini adalah potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu baik pembangunan fisik maupun non fisik (mental) adalah menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara bijaksana. Jika tidak, maka pembangunan bangsa kita akan mengalami kemunduran.

Selaras dengan pemikiran tersebut di atas, Kartasamita mengatakan bahwa:

”Pesan yang paling kuat dan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan di depan adalah manusia itu sendirilah yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi inilah yang harus dibangun kehidupannya, karena memang demikian hakekat pembangunannya, dan oleh karena itu harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya”. (1994:34)

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa hanya dengan kualitas dan kemampuan manusia yang baik sajalah yang bisa melaksanakan Pembangunan

Nasional, untuk merubah kehidupan bangsa Indonesia keluar dari kemelut kemiskinan, ke arah kehidupan yang lebih baik yaitu masyarakat adil dan makmur. Konsekuensi logisnya adalah sosok manusia rajin yang mengenal partisipasi, atau mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin dan mempunyai etos kerja yang berorientasi pada perubahan dan pembaharuan.

Kita ketahui bahwa manusia yang hendak dibangun itu sebagian besar menetap di desa, dengan latar belakang pendidikan rata-rata 9 tahun (SD dan SLTP), dan pendapatan yang rendah. Hal ini merupakan masalah sosial yang akan berpengaruh pada lemahnya etos kerja dan antusias dalam pembangunan, seperti kurang tanggung jawab, kurang disiplin, pesimis, merasa rendah diri, tidak percaya pada kemampuan sendiri, dan sebagainya. Masalah-masalah sosial seperti tersebut menuntut perhatian serius dari semua pihak, terutama dari Pemerintah dalam mencanangkan setiap program pembangunan, agar memperhatikan faktor motivasi yang menyenangkan dan menyentuh hati nurani masyarakat kecil secara terus menerus, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program pembangunan dimaksud.

Selaras dengan kemampuan untuk melihat dan melaksanakan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air menuju kepada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah seharusnya pembangunan desa lebih mendapat perhatian dalam Pembangunan Nasional, dengan pengakuan bahwa penduduk terbanyak menetap di desa, sehingga dapat dikatakan bahwa berhasilnya Pembangunan Nasional ditentukan oleh berhasilnya kita melaksanakan pembangunan desa. Untuk mendukung pembangunan desa tersebut agar dapat berjalan lancar, maka dalam prosesnya membutuhkan keikutsertaan yang tulus atau partisipasi masyarakat berupa swadaya gotong royong dalam suasana kekeluargaan. Namun pendekatan pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum pula menyentuh aspirasi mereka. Masyarakat dinilai bermental menunggu disuapi, dan untuk tidak selalu disuapi maka satu-satunya jalan alternatif bagi pemerintah dalam proses pembangunan desa yang membutuhkan partisipasi masyarakat, terpaksa dilakukan dengan sistem mobilisasi. Dalam kondisi seperti itu, partisipasi yang disumbangkan oleh masyarakat terjadi karena faktor keseganan dan ketakutan kepada pemerintah

sehingga dalam menyelesaikan suatu kegiatan selalu harus ada pengawasan. Bisa dibayangkan bahwa partisipasi yang demikian itu sudah jelas menghambat tujuan pembangunan desa itu sendiri. pembangunan desa itu sendiri. Sementara pembangunan desa itu sendiri pada prosesnya sedang menghadapi dilema dan tantangan. Globalisasi mulai dikenal sampai ke masyarakat lapisan bawah (rakyat kecil) oleh karena terbukanya isolasi fisik wilayah, bersamaan dengan maraknya arus komunikasi dan informasi yang semakin transparan, tetapi disinyalir, globalisasi diterjemahkan sebagai kesempatan berubah dan bergesernya nilai, misalnya dari kebiasaan menyelesaikan pekerjaan bersama-sama dan bergotong-royong, kini nilai semacam itu bergeser kepada hal-hal atau kebutuhan tertentu demi kepentingan individu masing-masing. Dampak negatif yang terjadi dari penetrasi nilai semacam itu dapat berupa menurunnya partisipasi murni dari masyarakat dalam proses pembangunan desa itu sendiri. Tentunya hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlangsung terus-menerus oleh karena tanggung jawab pembangunan ini pada pundak pemerintah dan masyarakatnya, karena hasil pembangunan harus dinikmati semua orang.

Untuk membangkitkan dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka pemerintah desa sendiri harus menggandeng tokoh-tokoh berpengaruh atau tokoh panutan masyarakat yang ada di desa. Kelompok tokoh panutan dan berpengaruh yang dimaksud dalam rancangan penelitian ini lebih dikenal dengan sebutan: Elit Informal. Hal itu dikarenakan peranan elit informal desa sangat penting dan menentukan. Peranan elit informal semakin terangkat di era otonomi daerah sekarang yang akan ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan desa Wonosari bersama-sama tokoh masyarakat lainnya dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kelebihan dan pengaruh mereka dalam aktivitas yang disumbangkan oleh mereka biasanya juga disambut baik oleh masyarakatnya.

Mendahului istilah elit berikut ini ada landasan teori yang dikemukakan oleh Pareto tentang elit sebagai berikut:

1. Mereka yang disebut elit ialah mereka yang mendapat indeks (skala) tertinggi di dalam bidang kegiatannya. Itulah yang membedakan elit dan non elit.
2. Ada dua macam elit yaitu (a) elit berkuasa, dan (b) elit tidak berkuasa. (Alfian, 1990:172-173)

Berangkat dari kedua elit tersebut dapat dikatakan bahwa elit berkuasa adalah Pemerintah Desa yang mempunyai kekuatan formal, sedangkan elit tidak berkuasa dalam penulisan ini disebut elit informal.

Salah satu yang termasuk dalam elit informal adalah elit agama dengan eksistensinya dalam masyarakat, mereka selalu tampil simpatik dan berkesan baik di mata masyarakat. Elit agama ini dapat menjalankan peranannya dalam menggerakkan dan mendapatkan partisipasi murni dari masyarakat melalui lembaga keagamaan dan lembaga social kemasyarakatan lainnya, Tentang elit agama ini Soeprpto mengatakan bahwa:

”Para kyai dipandang dan diposisikan sebagai pemimpin umat. Mereka adalah personifikasi dari sosok manusia teladan pewaris para nabi, orang yang memiliki keistimewaan, guru yang berpengetahuan luas dan dalam, orang yang dimintai restu, orang yang menyimpan sesuatu yang tersembunyi, orang yang memiliki sesuatu yang kita “nggak ngerti”, dan pribadi yang memiliki karomah”. (1997:8-9)

Pandangan yang tertanam kuat dalam relung masyarakat terhadap elit agama seperti yang dikemukakan Soeprpto tersebut berlaku pula di lokasi penelitian, di mana mereka selalu menjadi pola anutan/ikutan bagi masyarakat. Diharapkan pula elit informal menjadi motivator pembangunan desa, menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat, serta berfungsi sebagai filter atau penyaring dan penentu inovasi yang benar-benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan sebab strategi pembangunan sekarang yang semakin kompleks, lantas dimensi pandangan kepemimpinan formal dan kemauan politik, akan menjadikan kaum elit informal tergeser atau hanya sekedar *Symbolic Leader*.

Dalam hubungan dengan kenyataan bahwa pembangunan desa di lokasi penelitian berjalan dengan cukup baik, namun dukungan partisipasi masyarakat masih bersifat mobilisasi, sementara di desa ada kelompok elit informal, seperti tokoh agama (alim ulama), sesepuh adat, dan pengusaha-pedagang berpengaruh, dimana keberadaan mereka dalam masyarakat sering dijadikan panutan dan ukuran dalam suatu keberhasilan. Dengan kekuatan pengaruh yang mereka miliki, semestinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya peranan mereka sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pembangunan desa. Peranan yang dimaksud di sini

seperti dalam penentuan arah pembangunan desa, pemecahan permasalahan pembangunan, pelaksanaan kegiatan desa, bantuan material, dan sebagainya. Untuk itu berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas perlu diteliti sebagai upaya untuk mendeskripsikan peranan mereka dalam pembangunan desa, seyogyanya pengaruh mereka dapat dimanfaatkan sebagai potensi penggerak partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan desa.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian: **”Peranan Elit Informal dalam Pembangunan Desa. (Studi di Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)”**. Mengenai pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan tokoh-tokoh elit informal di Desa Wonosari yang mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat dan Pemerintah Desa.

B. Perumusan Masalah

Proses pembangunan desa yang sedang berlanjut ini sangat membutuhkan peranan dan partisipasi, serta kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, yang di dalamnya ada keterpaduan kepentingan dan kebutuhan. Namun pada prosesnya kerja sama yang diharapkan belum berjalan sebagaimana mestinya, disinyalir pada kesenjangan visi dan kepentingan.

Kendati diketahui bahwa eksistensi dan posisi elit informal sangat menentukan yaitu dengan kontribusi mereka dalam kegiatan-kegiatan tertentu, namun proses pembangunan desa masih dapat dikatakan belum berhasil dengan baik. Dan hal itu memerlukan jawaban serta penyelesaian yang disesuaikan dengan kelebihan pada masing-masing elit serta pola kehidupan masyarakat setempat.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

”Bagaimana peranan elit informal dalam meningkatkan pembangunan desa?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

“Untuk mendeskripsikan peranan elit informal dalam pembangunan desa yang dicapai”.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang hendak dicapai dalam rancangan penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi elit informal setempat agar potensi dan peranan mereka selalu diarahkan pada upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, di samping elit formal (pemerintah).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang bermfaat bagi Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya, berupa konsep yang berkaitan dengan eksistensi dan peranan elit informal dalam meningkatkan program pembangunan desa.
3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dan Pemeritah Desa setempat agar lebih menjalin hubungan kemitraan dengan elit informal dan keikutsertaanya di dalam setiap tahapan pembangunan desa.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I : PENDAHULUAN.

Merupakan Bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Pembahasanya.

Bab I : TINJAUAN PUSTAKA.

Merupakan Bab Kajian Pustaka, yang berisi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul Skirpsi yaitu Peranan Elit Informal Dalam Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tukur Nongkojajar Kabupaten Pasuruan.

Bab III : METODE PENELITIAN.

Merupakan Bab yang berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan, instrumen penelitian serta analisa datanya.

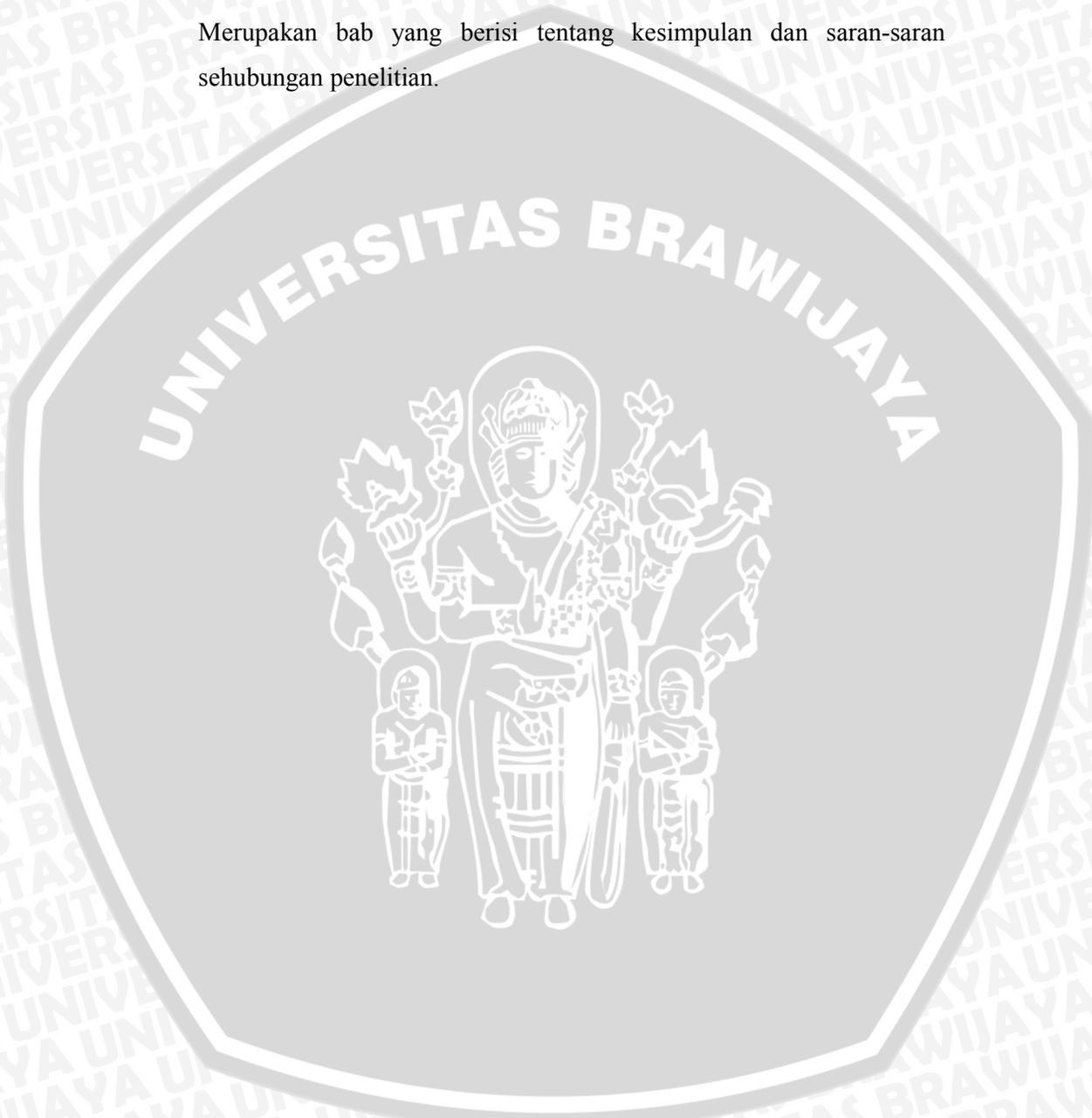
Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini memuat tentang gambaran umum dari lokasi penelitian serta penyajian data focus penelitian yang diperoleh di lapangan tempat

dilakukannya penelitian yang kemudian dianalisa dan diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori yang telah ada sehingga data lebih mudah dipahami dan tersusun secara sistematis.

Bab V : PENUTUP.

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Peranan Elit Informal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Peranan*, kata dasar *peran*, berakhiran *-an* berarti: seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (1989:667)

Kemudian Thoha, mengatakan bahwa: ”*Peranan*, menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang manajer di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya”. (1994:230)

Pendapat lain dari Soekanto yang mengatakan bahwa:

”Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal:

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti nilai ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
- Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. (1990:268-269)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat dan interaksi sosialnya, setiap orang memiliki peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Dengan peranan, seseorang dapat menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan juga tidak lepas dari nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, dimana nilai dan norma tertentu memikat setiap orang untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Jika seseorang menyalahgunakan peranan yang ada padanya maka masyarakat sekelilingnya akan berperilaku antipati, lambat laun dapat melemahkan kedudukan, eksistensi dan peranan itu sendiri.

Sebagaimana fokus penelitian peranan elit informal nanti. Hal-hal yang berkaitan dengan peranan itu sendiri adalah:

1. Elit Informal

Dalam tulisan di bidang ini mengemukakan bahwa istilah elit menunjukkan kepada minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang bertanggungjawab. Efektif dalam pengertian ini dilihat dari pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain, di tempat dimana golongan elit ini memberikan tanggapannya. Golongan elit yang mempunyai arti sosial, biasanya bertanggungjawab untuk realisasi-realisisasi yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial. Kelanjutan yang dimaksud di sini mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat.

Mendahului pengertian elit informal, perlu diketahui pengertian kata elit itu sendiri, menurut Keller sebagai berikut:

”Secara etimologis konsep elite berasal dari kata lain *eligere*, yang berarti *memilih*. Dalam pemakaian biasa, kata *eligere* berarti *bagian yang menjadi pilihan* atau *bunga* suatu bangsa dari budaya, kelompok usia dan juga kelompok orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Mulanya istilah itu berarti *bagian yang menjadi pilihan* atau *bunga* dari barang-barang yang ditawarkan untuk dijual, dan dengan demikian menandakan obyek-obyek itu bernilai pilihan”. (1995:3)

Kemudian Schoorl yang mengatakan bahwa:

“Dalam arti yang paling umum, elite itu menunjukkan sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan-kedudukan tinggi, dalam arti yang lebih khusus, yang ditunjuk ialah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang pemerintahan serta lingkungan di mana pemegang kekuasaan diambil”. (1984:128)

Pendapat lain dari Sanit yang mengatakan bahwa:

”Posisi seseorang dalam proses politik ialah: kemampuan tiap orang untuk mempengaruhi proses politik. Apabila seseorang tidak luput dari proses politik, maka sebaliknya hanya orang itu yang memiliki kemampuan mempengaruhi proses politik. Orang-orang yang berhasil menguasai sumber daya dan teknologi politik di samping daya juang dikenal sebagai elit, sedangkan kalangan luas anggota masyarakat yang kurang berhasil, disebut sebagai massa”. (1985:4)

Dalam ilmu sosial, penekanan istilah "elite" telah bergeser dari keadaan pilihan menjadi terkemuka. Dengan demikian arti yang paling umum adalah, sekelompok orang-orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Secara lebih umum, yang dimaksud dengan pengertian elit itu sendiri adalah posisi di dalam masyarakat, di dalam puncak-puncak struktur sosial yang terpenting yaitu posisi-posisi tinggi dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pendidikan, dan pekerjaan-pekerjaan bebas. Dapat dikatakan pula bahwa yang disebut elit adalah orang-orang yang mempunyai banyak kelebihan dan berpengaruh, menguasai sumber daya dan teknologi, mampu mengikuti perkembangan jaman.

Dengan bergesernya penekanan elit, dari keadaan pilihan menjadi terkemuka dimaklumi karena dalam masyarakat selalu saja ada kelompok-kelompok pilihan yang dalam suatu peristiwa formal maupun informal, mereka selalu menjadi yang terkemuka, dan keberadaan mereka diakui oleh masyarakat. Dalam hubungan itu pengaruh mereka terus berkembang.

Golongan elit selalu berkembang. Hal ini menurut Keller disebabkan oleh empat hal, yaitu:

"(1)Pertumbuhan penduduk, (2)Pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3)Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, dan (4)Perkembangan keberagaman moral. Dengan berkembangnya empat hal tersebut maka jumlah dan jenis elit menjadi semakin banyak". (Sumartono,1996:16)

Berikut ini untuk memahami pengertian elit informal sekaligus untuk membedakan pengertian elit formal, dalam hubungan dengan karya tulis ini, Keller, menguraikan bahwa:

"Elite yang diorganisir secara formal, sebagian besar terdiri dari otoritas dan ahli-ahli, sedangkan elite kebudayaan dan intelektual yang diorganisir secara informal, terdiri dari *pemimpin*. Otoritas memberikan perintah, para ahli memberikan kesan, tetapi para pemimpin mempengaruhi, meyakinkan, serta membujuk. Landasan otoritas adalah memegang jabatan secara formal, landasan keahlian adalah *keterampilan khusus*, sedangkan landasan kepemimpinan adalah *kekuatan dan kepribadian*". (1995:142)

Dari uraian Keller tersebut dapat diuraikan sekaligus sebagai batasan bahwa yang dimaksud peranan elit informal di sini adalah seperangkat tugas yang menjadi bagian, yang harus dilaksanakan oleh mereka yang terpilih atau terkemuka dalam masyarakat, dimana dalam menyelesaikan tugas tertentu selalu menggunakan ajakan yang berdasar pada kepemimpinan pribadi, serta menyelaraskan dengan kepribadian perilaku masyarakat dalam suasana kekeluargaan, tidak resmi, dan tidak terikat oleh peraturan atau kaidah-kaidah legal.

Lebih lanjut untuk membedakan elit formal dan elit informal di desa, kalau kita bandingkan dengan hasil penelitian Iberamsyah, ada kemiripan dengan pendapat Keller. Penelitiannya menghasilkan dua macam elit, yaitu elit formal dan elit informal. Elit informal meliputi: (a)Elit informal agama, (b)Elit informal cendekiawan, (c)Elit informal jawara, (d)Elit Informal pemuda, (e)Elit informal ekonomi, dan (f)Elit informal wanita, (dalam Sumartono, 1996:149)

Sedangkan menurut Sumartono bahwa:

“Elit formal adalah elit pamong desa, sedangkan elit informalnya adalah selain elit pamong desa, yaitu elit pemuda, elit wanita, elit cendekiawan, elit ekonomi, elit politik, dan elit agama.

Perbedaan antara elit formal dan elit informal adalah landasan pengaruhnya. Elit formal adalah elit yang landasan pengaruhnya didasarkan pada wewenang resmi atas kekuasaannya. Sedangkan elit informal adalah elit yang landasan pengaruhnya didasarkan pada kemampuan pribadi yang diakui oleh masyarakat. Elit ini adalah selain elit pamong desa”. (1996:149)

Diharapkan pilihan utama yang menjadi bagian atau kewajiban elit informal adalah mempengaruhi masyarakat dengan kemampuan pribadi yang dimiliki oleh elit informal, pengaruh mana yang bernilai pembinaan atau ajakan yang berjiwa pembangunan. Hal ini penting sebab mentalitas pembangunan bangsa kita masih lemah, antara lain berupa apatis dan masa bodoh.

Dalam menyikapi dan merubah mentalitas bangsa yang dimaksud, terdapat empat cara yang ditunjuk oleh Koentjaraningrat sebagai berikut:

1. Dengan memberikan contoh yang baik.
2. Dengan memberikan perangsangan-perangsangan yang baik.
3. Dengan persuasi dan penerangan.
4. Dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga. (1994:74)

Mudah-mudahan empat cara yang oleh ditunjuk Koentjaraningrat tersebut sudah mendekati upaya penyelarasan tujuan pembangunan dengan aspirasi masyarakat. Tinggal bagaimana kaum elit informal menyelaminya dan menterjemahkan kepada masyarakat dalam merubah mentalitas dan membangkitkan jiwa pembaharuan masyarakat, ke arah hidup yang lebih baik.

Hal ini penting mengingat pembangunan akan menjadikan masyarakat desa semakin kompleks baik dalam artian kepentingan maupun kebutuhannya, dan oleh karena beban pembangunan yang juga semakin kompleks, tidak mungkin hanya diserahkan dan ditangani oleh elit formal atau elit yang memerintah saja.

2. Macam dan Peranan Elit

Siagian mengklasifikasikan golongan elit yang dapat memberi pengaruh terhadap usaha pembaruan menjadi enam bagian yaitu:

1. Elit Politik

Elit ini dikenal dengan “legitimizer” (mereka yang mengesahkan) kehendak politik bangsa, juga mengenai politik pembangunan yang hendak dianut dan diselenggarakan oleh suatu bangsa. Penentuan tentang arah maupun bidang pembangunan yang harus dilaksanakan pemerintah dilakukan oleh elit ini.

2. Elit Administratif

Kelompok elit ini secara tradisional bertugas menterjemahkan kegiatan-kegiatan politik menjadi kebijaksanaan, rencana, serta program pembangunan dan pelaksanaannya.

3. Elit cendekiawan

Kewajiban dari elit ini adalah mencari kebenaran, jika memperjuangkan sesuatu atas nama ilmu untuk tujuan tertentu, berarti mengesampingkan ilmu itu sendiri, sebab esensi dari ilmu pengetahuan ialah *cinta kepada kebenaran*.

Besar atau tidak pengaruh dari kelompok elite ini, tergantung peranannya di dalam masyarakat. Peranan ini dapat dibagi menjadi dua hal, *pertama*: perhatian terhadap pemikiran-pemikiran yang

berorientasi kepada kebijaksanaan atau program pembaharuan; *kedua*: hubungan dengan elit-elit yang lain dalam masyarakat.

4. Elit Dunia Usaha

Sebenarnya elit ini belum begitu berkembang di negara-negara kurang maju. Elit dunia usaha masih memerlukan pembinaan, karena menurut pengalaman di berbagai negara tertentu menunjukkan bahwa orientasi mereka sangat menoleh kepentingan sendiri, maka pengaruhnya negatif bagi pembangunan.

5. Elit Militer

Elit militer akhir-akhir ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan maupun pembaharuan di berbagai negara baru berkembang. Elit militer peranannya secara efektif terlihat dalam pemberian otoritas pelaksanaan kebijaksanaan atau program serta stabilitas dan kontinuitas usaha pembangunan.

6. Elit Pembinaan Pendapat Umum (informed observer)

Elit ini dalam tugas sehari-hari menjadi penyalur informasi dan pembentukan pendapat masyarakat (public opinion). Tergolong dalam kelompok elit ini adalah mereka yang menguasai media massa, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Mereka dapat melaksanakan peranannya sebagai pencetus pemikiran pembaharuan-pembaharuan dan pengawasan sosial terhadap jalannya proses politik dan administratif. (Tjokroamidjojo, 1994:64-65)

Macam-macam elite tersebut di atas setidaknya-tidaknya dilihat secara umum pada level nasional.

3. Ciri-ciri dan Saluran Pengaruh Elit dalam Masyarakat Pedesaan

Selanjutnya untuk mengetahui ciri-ciri, peranan dan pengaruh elit dalam masyarakat pedesaan, Sumartono menyebutkan bahwa ada tujuh macam elit di desa yaitu:

a. Elit Agama

Elit agama mempunyai ciri-ciri, yaitu menguasai ilmu agama yang diwujudkan dalam kefasihan bacaan, menguasai hadits, menguasai tafsir agama, memahami dan mengenal tradisi yang aku ingin.

b. Elit Cendekiawan

Elit cendekiawan mempunyai ciri-ciri yaitu pandai, terampil dan terbuka; mempunyai kemampuan untuk menjawab atau memberi pemecahan terhadap berbagai masalah yang diajukan oleh masyarakat untuk berdiskusi, dan meminta nasihat tentang masalah yang dihadapi masyarakat; pendidikannya relatif lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya; dan saluran pengaruh yang digunakan adalah lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi Pemerintahan Desa.

c. Elit Pemuda

Elit pemuda mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai kepandaian, ketrampilan, dan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang

diserahkan masyarakat kepadanya; semangat kerja keras; menghormati yang tua, mematuhi nasihat dan petunjuk orang yang dituakan; dan saluran pengaruh yang digunakan adalah prestasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

d. Elit wanita

Elit Wanita mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai kepandaian, rela berkorban, jujur, dan santun terhadap yang lain; mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain; dan saluran pengaruh yang digunakan adalah lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan.

d. Elit Ekonomi

Elit Ekonomi mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai semangat kerja keras, kaya, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat dan jujur; saluran pengaruh yang digunakan adalah kegiatan desa, dan kedermawanan.

f. Elit Politik (Partai Politik)

Elit politik mempunyai ciri-ciri, yaitu menduduki posisi puncak pada organisasi politik di desa; rela berkorban, jujur, tempat anggota masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi tentang politik; saluran pengaruh yang digunakan adalah organisasi politik.

g. Elit Pamong Desa

Elit pamong desa mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai kekuasaan formal untuk mempengaruhi masyarakat; mempunyai kemampuan untuk memimpin dalam berbagai keinginan yang berkaitan dengan hidup masyarakat; kaya dan jujur; dan saluran pengaruh yang digunakan adalah kegiatan desa. (1996:146-148)

Dari uraian dan penjelasan tersebut jelaslah bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok elit yang mempunyai pengaruh, dan dengan pengaruh tersebut mendorong mereka untuk berperan pada setiap kesempatan melalui aktivitas yang disumbangkan, sesuai dengan kelebihan spesifik yang disandangnya, dan masyarakat mengakui keberadaan kaum elit menurut aktivitas yang dilakukan sejak lama. Karenaya agar dalam proses pembangunan desa (kaum elit) selalu mau berperanan dan menjadikan diri pola anutan/ikutan dalam masyarakat, menjadikan diri sebagai motivator pembangunan, dan menjadi agen pembaharuan.

Kaum elit, pada dasarnya mempunyai nilai moral, sesuai dengan predikat yang disandangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Keller, bahwa:

“Nilai moral yang pokok dalam hubungan dengan elit politik, ialah kekuasaan. Dalam hubungan dengan elit ekonomi, ialah harta. Dalam

hubungan dengan elit budaya, ialah keaslian. Dalam hubungan dengan elit militer, ialah keamanan, dan dalam hubungan dengan elit ilmiah mewakili kebenaran". (1995:411)

Akibat beragamnya nilai moral yang melekat pada elit-elit penentu di dalam suatu masyarakat, menyebabkan pendirian mereka menjadi sangat kuat, terutama dalam bersikap. Selanjutnya dapat dibayangkan bahwa dengan pendirian dan sikap kaum elit yang selalu berpatokan pada nilai moral tertentu, membuat citra diri mereka dipengaruhi oleh standar moral tersebut. Kekuatan semacam itulah yang membuat masyarakat diam-diam menilai, dan mempunyai harapan untuk menumbuhkan gaya hidup yang khas sesuai dengan nilai moral dari elit yang menyentuh hati nurani masyarakat.

Elit informal sebagaimana batasan studi di lokasi penelitian pun mendasarkan diri pada nilai-nilai moral yang melekat. Nilai moral hakiki itulah yang sesungguhnya potensi dari masing-masing elit informal untuk melibatkan diri bersama-sama pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

B. Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan

Sesuai dengan kedudukannya administrasi negara sebagai suatu cabang dari sistem keilmuan dalam segala tujuan dan perilakunya, senantiasa berpedoman pada sudut pandang serba logis, rasional dan obyektif. Sedangkan dalam prakteknya mengajarkan kita metode-metode serta perilaku yang berprinsip kepada efisiensi, tindakan yang terkoordinasi dan sinkron mengutamakan kerja yang seimbang dan berspesialis serta berorientasi untuk mendukung pembangunan.

Sementara itu apabila administrasi negara dikaitkan dengan pembangunan, dapat dikatakan bahwa administrasi pembangunan tidak lain adalah administrasi negara yang ditujukan untuk mendukung proses pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan John D Montgomery dan Milton J, Esman bahwa:

“Administrasi pembangunan tidak lain adalah administrasi negara (yang lebih ditujukan) untuk mendukung prose pembangunan. Administrasi

pembangunan adalah pembangunan atau penyempurnaan administrasi negara dan penyempurnaan administrasi bagi penyelenggaraan proses pembangunan". (Tjokroamidjojo, 1988:11-13) sebagai berikut:

Dengan demikian ada dua fungsi administrasi pembangunan yang secara sederhana digambarkan dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan Penyempurnaan Administrasi Negara

Tentu saja agar lebih dapat mendukung tugas-tugas pembangunan pemerintah itu meliputi hal-hal antara lain :

1. Kepemimpinan administratif, kepemimpinan inovatif dan administrator pembangunan.
2. Pendayagunaan kelembagaan (organisasi-organisasi pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan).
3. Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan).
4. Pendayagunaan ketatalaksanaan (kalau dikaitkan dengan organisasi; disebut masalah organisasi dan tata laksana termasuk prosedur dan tata kerja) misalnya keuangan negara, tata laksana peralatan dan perlengkapan pemerintah.

2. Penyempurnaan Administrasi bagi Penyelenggaraan Proses Pembangunan

Ini juga disebut sebagai administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau ketatalaksanaan pembangunan ini meliputi antara lain:

1. Administrasi perencanaan dan pemrograman pembangunan (misalnya kemampuan dan mekanisme analisis dan pembentukan kebijaksanaan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran).
2. Administrasi mobilisasi dan pembangunan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (misalnya sistem dan administrasi perpajakan).
3. Administrssi pembiayaan pembangunan (penyaluran biaya untuk berbagai macam kegiatan pembangunan yang berbeda-beda sifatnya).
4. Administrasi/Manajemen program dan proyek pembangunan, termasuk berbagai cara koordinasinya.
5. Administrasi/Sistem pengendalian dan pengawasan (pengawasan atasan langsung atau pengendalian manajemen dan pengawasan fungsional).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kaitan antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan adalah erat sekali, sebab administrasi pembangunan juga dapat merupakan administrasi negara karena salah satu kegiatan administrasi negara adalah untuk mendukung, mengarahkan dan mendorong kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa administrasi negara mempunyai keterkaitan dengan administrasi pembangunan, hal ini juga disebabkan karena salah satu tugas dari administrasi negara dalam bidang pembangunan adalah seperti yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo sebagai berikut

“...Pelaksanaan pendayagunaan administrasi negara/pemerintahan tersebut dilakukan agar lebih mampu, lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tugas-tugas ilmu pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.... tugas-tugas pembangunan; contoh antara lain perencanaan dan pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan”. (1988:15)

Berpijak pada pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan desa, peranan administrasi negara sangat dibutuhkan dalam hal kemampuan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasilguna.

C. Program Pembangunan Desa

1. Pengertian Program

Tentang pengertian program dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa, ”program adalah rangkaian mengenai azas-azas serta usaha-usaha yang dijalankan”. (1989:702). Selanjutnya pengertian tentang program yang dikemukakan United Nation yang dikutip oleh Zauhar yang menyatakan bahwa:

“Programme is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more in going organization and activities”. (Program mengandung makna suatu kegiatan dari organisasi sosial dengan tujuan khusus dibatasi ruang dan waktu. Program yang saling berhubungan dan biasanya dibatasi oleh satu atau lebih kegiatan-kegiatan organisasi)”. (1993:2)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program adalah rancangan dasar dari suatu kelompok orang atau organisasi yang akan dilaksanakan dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk mencapai tujuan tertentu dan biasanya suatu program berhubungan erat dengan proyek sebagai tindakan operasionalnya.

Dari definisi program tersebut dapat pula diketahui bahwa suatu program di samping bersifat alokatif dan distributif, program juga bersifat inovatif dan multifungsi. Sehingga dengan suatu program diharapkan berbagai masalah yang berhubungan dengan pembangunan dan kemasyarakatan dapat dipecahkan. Dengan demikian konsekuensinya jika banyak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, maka banyak pula dibutuhkan suatu program.

Berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pembangunan seperti program Keluarga Berencana (KB), Peningkatan Gizi, Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program Jaring Pengaman Sosial (PJPS) dan lain sebagainya yang pada prinsipnya digunakan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pembangunan.

Suatu program pada hakekatnya di samping mempunyai tujuan untuk membantu memecahkan suatu permasalahan tertentu, juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini.

Selanjutnya United Nation menyatakan bahwa:

”Ciri-ciri suatu program meliputi:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan onkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.

- f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut". (Zauhar, 1993:2)

Dengan demikian suatu program hendaknya memiliki keenam ciri yang disebutkan di atas, baik itu program pembangunan desa maupun program dari masyarakat dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan desa.

Kemudian mengenai definisi konsep tentang proyek dapat dilihat dari pendapat Siagian yaitu: "Proyek adalah serangkaian kegiatan dengan cara kerja tertentu, kriteria keberhasilan, lokasi yang jelas, jumlah biaya yang pasti, sumber biaya yang diterapkan dan dikelola oleh sekelompok orang yang secara khusus ditunjuk untuk itu". (Zauhar, 1993:3)

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proyek adalah suatu kegiatan dari sekelompok orang yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan atau mengelola sumber daya yang ada dengan waktu yang terbatas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian antara konsep program dan konsep proyek merupakan suatu kesatuan yang terkait erat atau dapat dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Program merupakan rancangan dasar untuk mencapai suatu tujuan sedangkan proyek merupakan pelaksana dari rancangan tersebut dalam pencapaian tujuan.

2. Pembangunan Desa

Kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, bukan disebabkan ketidakpahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan tetapi justru begitu banyak aspek dan masalah yang diketahui, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi satu bentuk rumusan yang komplit.

Dalam pengertian sebenar-benarnya, dapatlah disebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perkembangan selanjutnya, pengertian-pengertian tentang pembangunan oleh para pakar antara lain:

Rogers, mendefinisikan pembangunan:

”sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipasi secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan keberadaan (termasuk keadaan yang lebih besar, kebebasan dan kualitas yang dinilai tinggi) dari yang lainnya, bagi mayoritas melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap tingkatannya”. (Nasution, 1996:66)

Kemudian Tjokroamidjojo, mengemukakan bahwa ”Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”. (1994:222)

Pendapat lain menurut Siagian, bahwa:

”Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha-usaha atau rangkaian pertumbuhan atau perubahan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)”. (1985:2-3)

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan sosial untuk merubah dan memperbaharui keadaan secara berencana, yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat yang bersifat partisipasi secara terus menerus ke arah kehidupan yang lebih baik, guna mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dalam rangka pembinaan bangsa.

Selanjutnya pengertian desa secara normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pendapat lain menurut Asy 'Ari, bahwa:

”Berdasarkan pemikiran dan karakteristik yang dipakai oleh kota, yaitu dari aspek morfologi, aspek penduduk, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya serta aspek hukum, sebagai berikut:

- Dari aspek morfologi, desa adalah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggalnya yang terpencar (jarang)

- Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah penduduk dengan kepadatan penduduk yang rendah
- Dari aspek ekonomi, desa adalah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam, atau agraria atau nelayan
- Dari aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengkotaan atau dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong-royong
- Dari aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri. (1993:93),

Selanjutnya pengertian pembanguna desa menurut Kansil adalah:

”Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu, dengan imbalan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat di manapun wajib memberikan bimbingan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan”. (1984:134)

Kemudian Batten mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan pedesaan adalah proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka. (Khairuddin H, 1992:67)

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang dalam prosesnya membutuhkan keikutsertaan yang tulus secara bersama-sama (gotong royong) masyarakat di desa dalam suasana kekeluargaan, untuk memenuhi keinginan mereka di manapun sebagai penggeraknya.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini terdapat kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pembangunan desa tersebut.

Menurut pendapat Marbun yang menyatakan bahwa:

”Pelaksanaan pembangunan desa dewasa ini hanya dapat berhasil apabila:

- a. Memperhatikan rencana yang baik, masuk akal, dan direalisasikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

- b. Tersedianya sumber daya manusia, modal, dan sumber daya lainnya.
- c. Adanya organisasi yang mampu mewujudkan rencana menjadi hasil". (1983:39)

Memperhatikan ketiga persyaratan tersebut di atas maka jelas terlihat bahwa keberhasilan pembangunan desa akan ditentukan antara lain oleh perencanaan pembangunan desa yang baik, tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta adanya organisasi yang mampu mengelola sumber daya tersebut. Selanjutnya dalam pembangunan desa, khususnya di bidang fisik, pelaksanaan pembangunan desa lebih ditekankan pada swadaya dan gotong royong serta partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu konsekuensi logis dari pelaksanaan pembangunan desa harus dapat meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat desa tersebut agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan di wilayah pedesaan tersebut adalah melaksanakan evaluasi atau kegiatan penelitian terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan terlebih dahulu menetapkan standar atau kriteria tentang faktor-faktor yang dapat diukur sebagai hasil dari pelaksanaan dalam pembangunan desa tersebut.

Menurut pendapat Ndraha menyatakan bahwa:

"Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat diukur dari aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
2. Rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dapat tumbuh/ditingkatkan.
3. Prasarana fisik, dan
4. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara". (1981:15)

Melalui pengukuran terhadap kriteria yang dikemukakan tersebut maka hasil-hasil dari pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan desa dapat diketahui apakah telah mampu mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan atau masih belum dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dan selanjutnya berdasarkan penilaian yang dilaksanakan maka dalam tahap pembangunan berikutnya dimungkinkan untuk diperoleh

adanya masukan-masukan terutama yang berkaitan sekali dengan hasil penilaian tersebut.

D. Peranan Elit Dalam Pembangunan Desa

Untuk mendeskripsikan peranan elit informal dalam pembangunan, berikut ini adalah beberapa kajian teoritis mengenai peranan para elit. Menurut Schoolr bahwa:

”Para elit di luar pemerintahan harus diberi peranan yang sangat pokok dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang. Elit itu diharapkan akan meneruskan dan mempertahankan orde yang ada. Elit harus mengetahui orde tersebut dan harus memberi pimpinan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan orde tersebut. Dalam situasi yang demikian itu elit menawarkan jasanya dan menurut kepribadiannya elit itu memang cocok untuk peranan itu”. (1988:129)

Kemudian Siagian mengemukakan bahwa:

”Seorang tokoh yang disegani bisa menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, obyektif dan netral, dan sebagai integrator”. (1994:74)

Dari uraian-uraian di atas dapatlah memberi suatu pemahaman bahwa elit informal berperanan dalam kaitannya dengan pembangunan yaitu sebagai *mediator* atau penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka mampu menggambarkan situasi yang sebenarnya sekaligus memberikan jawaban atas situasi tersebut. Elit harus dapat melakukan semua itu dengan cara yang menimbulkan kepercayaan pada masyarakat, lebih-lebih pada mereka yang berperan mengambil keputusan, dalam hal ini adalah pemerintah. Yang terpenting adalah mereka mempunyai kemampuan menterjemahkan atau mensosialisasikan program-program yang disusun pemerintah kepada masyarakat karena faktor kedekatan mereka dengan masyarakat. Sebaliknya mereka juga menjadi penampung aspirasi rakyat sementara untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah, walaupun pada akhirnya hanyalah aspirasi-aspirasi pilihan yang benar-benar akan dijadikan bahan diskusi dengan pihak pemerintah.

Rogers dan Shoemaker menyatakan bahwa: ”...Karena posisi kekuatan mereka, elit ini dapat bertindak sebagai penjaga gawang (*goal keepers*) dalam

menentukan inovasi mana yang boleh masuk ke dalam sistem, dan mana yang tidak". (Hanafi, 1987:193). Dengan ilustrasi bahwa elit informal bertindak sebagai *goal keepers* tertentu, diharapkan elit informal yang menjadi *filter* atau penyaring dan penentu inovasi tersebut benar-benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat, utamanya rakyat kecil.

Sedangkan pendapat lain dari Alwi dan Zainal bahwa:

"Kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan pada saat ini, mereka sering mampu mempergunakan kekuasaan dalam kedudukan sebagai oposisi. Di pihak lain mereka menciptakan jalan bagi partisipasi, mempengaruhi jenis kebijaksanaan yang akan ditetapkan, mempercepat dan memperlambat perubahan. Mereka ini merupakan kekuatan yang memegang peranan penting di banyak negara berkembang". (1989:3)

Berdasarkan uraian tersebut, maka elit informal merupakan elit-elit penentu dalam proses pembangunan, yaitu bertindak sebagai kontrol terhadap pemerintah, serta dengan kekuatan yang mereka miliki pula mempengaruhi kebijaksanaan apa yang akan ditetapkan oleh pemerintah agar supaya benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena pada dasarnya hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain elit informal juga menjalankan peran pengawasan dan evaluasi dalam proses pembangunan,

Karena masing-masing kelompok elit informal mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mempengaruhi masyarakat, maka sejak dini sudah harus dilakukan pendekatan budaya dan pendekatan perilaku terhadap kaum elit tersebut, agar peranan yang dijalankan dalam pembangunan berjalan lancar dan dalam persepsi dan visi yang sama. Apalagi kehidupan masyarakat sekarang ini sudah lebih kompleks mencakup segala bidang bila dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Misalnya saja dari suatu keadaan dan kebiasaan bekerja secara bergotong royong, kini cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pribadi atau individu, karena nilai-nilai baru dari konsekuensi globalisasi dan ciri hakiki dari manusia yang tidak pernah puas dengan keadaan. Kondisi seperti inipun menurut kaum elit informal berperan mengikuti kekomplekan kebutuhan masyarakat, sambil memotivasi dan mengendalikan mereka pada tujuan bersama yang diharapkan. Di sinilah sebenarnya posisi dan peran kaum elit sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang dikatakan Keller, tentang pentingnya elit dalam konteks sosial sebagai berikut:

”Bahwa semua elit adalah penting dalam beberapa konteks sosial dan psikologis, hanya sebagian yang penting dalam masyarakat secara keseluruhan. Elit-elit tertentu membangkitkan perhatian seketika, tetapi hanya kelompok-kelompok kepemimpinan tertentu yang mempunyai dampak sosial yang umum dan bertahan”. (1995:27-28)

Apa yang dikemukakan Keller di atas menunjukkan bahwa memang eksistensi elit informal dan peranannya dalam konteks sosial sangat penting, meskipun pengaruhnya tidak semua dapat diterima dan antara lain bertahan dalam masyarakat. Kendati demikian hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa kaum elit dapat membangkitkan perhatian seketika. Begitu mudahnya mereka mengalihkan dan membangkitkan masyarakat, oleh karena fenomena kultural yang melekat pada diri mereka, hal inipun seharusnya merupakan momen bagi pemerintah dalam pengakuan bahwa pada prinsipnya keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

Uraian-uraian terlebih dahulu telah dikemukakan bahwa eksistensi dan peranan elit informal di tengah-tengah masyarakat desa menjadi panutan dan karenanya hal itu merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal ini beralasan, bahwasannya kaum elit informal mempunyai pengaruh. Dalam konteks ini pemerintah mempunyai mitra kerja yang sangat mendukung keberhasilan pembangunan, sebab melalui kelompok elit informal dan bersama mereka, pemerintah memperoleh kemudahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, lantas eksistensi elit informal yang dipandang selalu tercermin suatu fenomena kultural, dengan sendirinya membuat masyarakat serta merta menyumbangkan partisipasi yang tulus dan murni. Masyarakat selalu optimis bahwa *goal keepers* mereka adalah seorang ”insider” atau pendamping yang mampu melaksanakan tawaran kultural.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman mengenai beberapa peranan elit informal dalam pembangunan desa, bahwa dengan adanya keterlibatan elit informal di desa diharapkan menjadi mediator atau penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi,

serta memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan desa dapat berhasil dengan baik.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu melalui penggambaran dan menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal yang mengatakan:

”Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena antara lain kegiatan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan permasalahan dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada”. (1999:20)

Bertitik tolak dari pendapat di atas, apabila dikaitkan dengan fokus penelitian maka penelitian deskriptif ini dipergunakan untuk menggambarkan peran elit informal dalam pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tutur Nongkojajar Kabupaten Pasuruan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data yang akan dikumpulkan, bahwa maksud dari ditetapkan fokus adalah: ”*Pertama*: Menetapkan fokus dapat membatasi studi, yang berarti dengan adanya suatu fokus, tempat penelitian menjadi lebih layak. *Kedua*: Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi *inklusi-eksklusi* atau memasukkan dan mengeluarkan sesuatu informasi yang diperoleh di lapangan”. (Moleong, 1993:62)

Berdasarkan konsep tersebut maka untuk membatasi studi penelitian ini, peneliti akan memusatkan perhatian pada elit informal politik (anggota partai politik tertentu), elit cendekiawan (guru, kyai, ustadz), elit pemuda (karang taruna), dan elit informal ekonomi (pengusaha/pedagang).

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: peranan elit informal dalam pemangunan desa:

- a) Penentuan arah pembangunan desa;

- b) Pemecahan permasalahan pembangunan desa;
- c) Pelaksanaan kegiatan desa;
- d) Bantuan material elit informal;

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Wonosari Kecamatan Tuter Nongkojajar Kabupaten Pasuruan. Hal ini beralasan, bahwasanya:

1. Merupakan desa percontohan di Kecamatan Tuter Pasuruan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi dan kemasyarakatan yang relatif baik di antara desa-desa lainnya di Kecamatan Tuter.
2. Terdapat banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kekuatan pengaruh besar di kalangan masyarakat hingga Pemerintah Desa.
3. Merupakan salah satu daerah target wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2007 berdasarkan keinginan masyarakat yang menyadari benar akan potensi keindahan alam dan budaya Desa Wonosari, diperjuangkan bersama hingga sampai di Pemerintah Propinsi.

Berawal dari beberapa alasan di atas, maka penulis berminat untuk mengkaji dan menyumbangkan pikiran tentang pembangunan desa yang berhasil antara teori dan aplikasinya, berhubungan dengan masalah tersebut. Sedangkan situs peneliti ini sebagai berikut:

1. Kantor Kepala Desa Wonosari, termasuk sekretariat Desa Wonosari untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang elit-elit informal yang berpengaruh di desa, serta kegiatannya dalam hubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa.
2. Tempat-tempat organisasi kepemudaan dan usaha dagang, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan partisipasi mereka dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa.
3. Sekretariat Kecamatan Tuter, untuk memperoleh dukungan jenis data sekunder dan sumber data primer dari informan seperlunya.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer, yaitu data yang berasal dari wawancara peneliti dengan orang-orang yang dipilih sebagai nara sumber atau informan. Mereka dipandang mempunyai sangkut paut dan menguasai permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - a) Kepala Desa Wonosari;
 - b) Tokoh politik (anggota partai politik);
 - c) Tokoh intelektual (guru, kyai, ustadz);
 - d) Pedagang dan pengusaha;
 - e) Tokoh pemuda (karang taruna);
 - f) Masyarakat yang mengetahui masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan, ataupun data-data yang ada dalam monografi dan profil desa, serta materi dan informasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview), yaitu teknik perolehan data dengan cara bertanya langsung kepada para informan yang berkompeten;
2. Pengamatan langsung (observasi), yaitu teknik perolehan data dengan mengamati langsung dari dekat terhadap obyek penelitian, bertitik tolak pada fokus penelitian. Perlu ditekankan bahwa pengamatan langsung di sini dilakukan pada peristiwa dan fenomena sosial yang terjadi sekarang, dengan beberapa informan yang dianggap representatif;
3. Dokumentasi, yaitu teknik perolehan data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan erat dengan fokus penelitian pada Sekretaris Desa Wonosari;

F. Instrumen Penelitian

- A. Peneliti sendiri selaku instrumen utama. Yang dimaksud dengan peneliti sebagai instrumen utama di sini bukanlah suatu pandangan yang melihat peneliti sebagai alat (dalam artian benda mati). Peneliti adalah manusia. Bahwa di dalam diri manusia ada potensi panca indera, dan dengan potensi

panca indera inilah dimanfaatkan oleh peneliti secara otomatis berhubungan dengan informan maupun dalam mengamati serta menginterpretasikan fenomena sosial yang terjadi, oleh karena manusia secara keseluruhan bukanlah alat atau benda.

- B. Pedoman wawancara (interview guide), sebagai alat bantu yang dijadikan penuntun bagi peneliti dalam penggalan/pengumpulan data.
- C. Catatan lapangan (field notes), yaitu catatan yang dibuat oleh peneliti di saat mengadakan pengamatan, wawancara atau menyaksikan kejadian-kejadian tertentu. Moleong (1993:100)

G. Analisa Data

Analisis Data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data adalah “rangkaiian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah”.(Suprayogo dan Tobroni,2001:191). Mereka juga mengutip pendapat Miles dan Huberman bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi dalam analisis data kualitatif alur kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengumpulan data
Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata yang terkumpul dalam aneka cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi).
2. Reduksi data
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ”kasar” yang muncul dan catatan-catatan tertulis di lapangan.
3. Penyajian data
Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Data yang telah diperoleh di lapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis datanya nanti akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta jarang sekali menggunakan data yang berupa angka. Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel untuk mendukung kelengkapan data dan kevalidan data.

Dalam metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka metode analisisnya metode analisis kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENYAJIAN DATA

Untuk memperoleh kejelasan dari hasil penelitian di lapangan, dengan melalui beberapa tahapan metode-metode seperti penulis sebutkan dalam bab terdahulu, yaitu observasi, interview, dari metode tersebut tentu akan mendapatkan data-data yang bervariasi, penjelasan berupa data akan dijelaskan kemudian disimpulkan. Data tersebut akan dijelaskan secara keseluruhan dari jawaban obyek penelitian ini atau responden. Untuk memperoleh dan mempermudah pemahaman laporan penelitian ini akan disajikan berturut-tuet tentang peranan elit informal dalam pembangunan desa.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Wonosari terletak di daerah pegunungan dan berbukit dengan ketinggian 800-1200 M , dengan suhu rata-rata 18-24 derajat celcius. Dengan topografi seperti itu Desa Wonosari termasuk kategori dataran tinggi. Luas Desa Wonosari adalah 292,015 Hektar, ditambah dengan luas hutan 114,8 Hektar. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tutur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pungging dan Desa Andonosari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kayukebek, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gendro dan Desa Blarang. Pembagian wilayah Desa Wonosari terdiri dari 7 dusun, 13 Rukun Warga, dan 36 Rukun Tetangga.

Sedangkan mengenai orbitrasi jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Tutur adalah 0,7 kilometer, jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan adalah 50 kilometer, jarak dari pusat pemerintahan Propinsi Jawa Timur adalah 85 kilometer, dan jarak dari pusat pemerintahan Ibukota Negara adalah 850 kilometer.

2. Kependudukan

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Wonosari adalah 5653 jiwa, dengan rincian laki-laki 2838 jiwa dan perempuan 2815 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga adalah 1447 jiwa. Semua penduduk di wilayah Desa Wonosari adalah Warga Negara Indonesia, tidak terdapat satu pun Warga Negara Asing. Adapun berikut adalah penggolongan penduduk Desa Wonosari berdasarkan kelompok umur:

Tabel 4.1
Penduduk Desa Wonosari Berdasarkan Kelompok Umur

No	Usia Penduduk	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	0-14 tahun	843	
2	15-19 tahun	407	
3	20-39 tahun	1434	
4	40-54 tahun	1071	
5	55-64 tahun	955	
6	65 tahun ke atas	943	
	Jumlah	5653	

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Sedangkan mengenai mata pencahariannya, penduduk Desa Wonosari tidak hanya terpaku pada bidang pertanian saja. Hal ini dapat dilihat dari aneka ragam pekerjaan penduduk setempat. Adapun mengenai penggolongan berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Wonosari Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Petani	295	
2	Buruh tani	366	
3	Pedagang	396	
4	Tukang batu/kayu	148	
5	PNS/TNI/POLRI	106	
6	Karyawan swasta	378	
7	Wiraswaata/jasa lainnya	757	
	Jumlah	2446	

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Seluruh masyarakat Desa Wonosari masing-masing memeluk agama yang diyakininya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat merupakan masyarakat yang religius dan sangat menghormati pemuka

agama. Adapun rincian mengenai agama yang dipeluk penduduk Desa Wonosari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Wonosari menurut Agama

No	Pemeluk Agama	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Islam	5328	
2	Kristen	326	
3	Katolik	85	
4	Hindu	4	
5	Budha	0	
	Jumlah	5653	

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Sebagian besar penduduk Desa Wonosari merupakan pemeluk agama Islam. Sehingga dengan masyarakat Islam mayoritas ini pantas saja apabila golongan ulama menjadi tokoh masyarakat yang paling dihormati. Sedangkan mengenai tingkat pendidikan Desa Wonosari dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Wonosari Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Buta huruf	19	
2	Tidak tamat SD	188	
3	SD/ sederajat	1997	
4	SLTP/ sederajat	1879	
5	SMU/ sederajat	1006	
6	Akademi	128	
7	Universitas	108	
	Jumlah	5323	

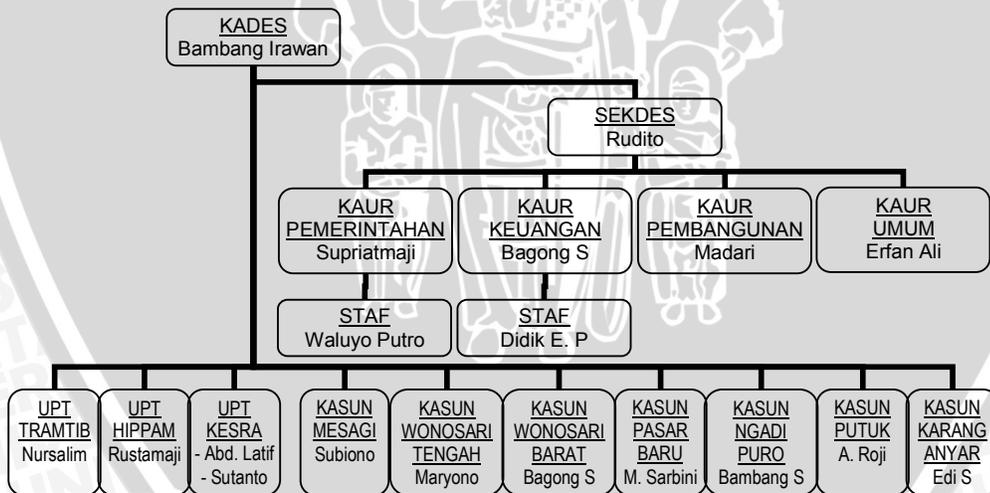
Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Berdasarkan data statistik di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Wonosari peduli akan pentingnya pendidikan. Dari sedikit jumlah masyarakat yang buta huruf tersebut adalah dari kelompok usia 55 sampai dengan 64 tahun. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pada zaman dahulu ketika mereka masih muda, pendidikan belum menjadi sesuatu yang dianggap penting di kalangan masyarakat Desa Wonosari.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Wonosari mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada rakyat pemilih disampaikan kepada Bupati Pasuruan melalui Camat Tutur setelah memberikan keterangan atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Desa dibantu perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM). Adapun berikut adalah struktur organisasi pemerintahan dan daftar nama perangkat desa, struktur organisasi dan daftar nama Badan Permusyawaratan Desa, struktur organisasi dan daftar nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa Wonosari



Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Tabel 4.5
Daftar Nama
Perangkat Desa Wonosari

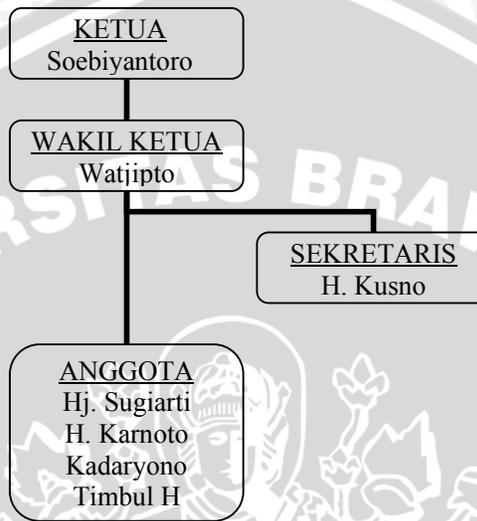
No	Nama	Jabatan	Surat Keterangan Pengangkatan	
			Dari	Nomor
1	Rudito	Sekretaris Desa	Kades	141/01/SK/424.120.0 7.05/2002
2	Supriatmaji	Kaur Pemerintahan	Kades	141/02/SK/424.120.0 7.05/2002
3	Waluyo Putro	Staf Kaur Pemerintahan	Kades	141/17/SK/424.120.0 7.05/2002
4	Drs. Bagong S	Kaur Keuangan	Kades	141/03/SK/424.120.0 7.05/2002
5	Didik E. P	Staf Kaur Keuangan	Kades	141/18/SK/424.120.0 7.05/2002
6	Madari	Kaur Pembangunan	Kades	141/04/SK/424.120.0 7.05/2002
7	Erfan Ali	Kaur Umum	Kades	141/05/SK/424.120.0 7.05/2002
8	Abdul Latif	UPT Kesra	Kades	141/06/SK/424.120.0 7.05/2002
9	Sutanto	UPT Kesra	Kades	141/09/SK/424.120.0 7.05/2002
10	Rustamaji	UPT HIPPAM	Kades	141/07/SK/424.120.0 7.05/2002
11	Nursalim	UPT Tramtib	Kades	141/08/SK/424.120.0 7.05/2002
12	Bambang S	Kasun	Kades	141/10/SK/424.120.0 7.05/2002
13	Edi Sumantoro	Kasun	Kades	141/11/SK/424.120.0 7.05/2002
14	H. A. Roji	Kasun	Kades	141/12/SK/424.120.0 7.05/2002
15	Subiono	Kasun	Kades	141/13/SK/424.120.0 7.05/2002
16	Maryono	Kasun	Kades	141/14/SK/424.120.0 7.05/2002
17	M. Sarbini	Kasun	Kades	141/15/SK/424.120.0 7.05/2002
18	Drs. Bagong S	Kasun	Kades	141/16/SK/424.120.0 7.05/2002

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Apabila dilihat dari kuantitasnya, Perangkat Desa Wonosari sudah sesuai dengan kebutuhannya. Setiap bidang dipegang oleh satu orang

pejabat, kecuali bidang keuangan, pemerintahan dan pelayanan kesra yang diisi lebih dari satu orang. Kemudian berikut ini adalah mengenai Badan Permusyawaratan Desa Wonosari:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi
Badan Permusyawaratan Desa Wonosari



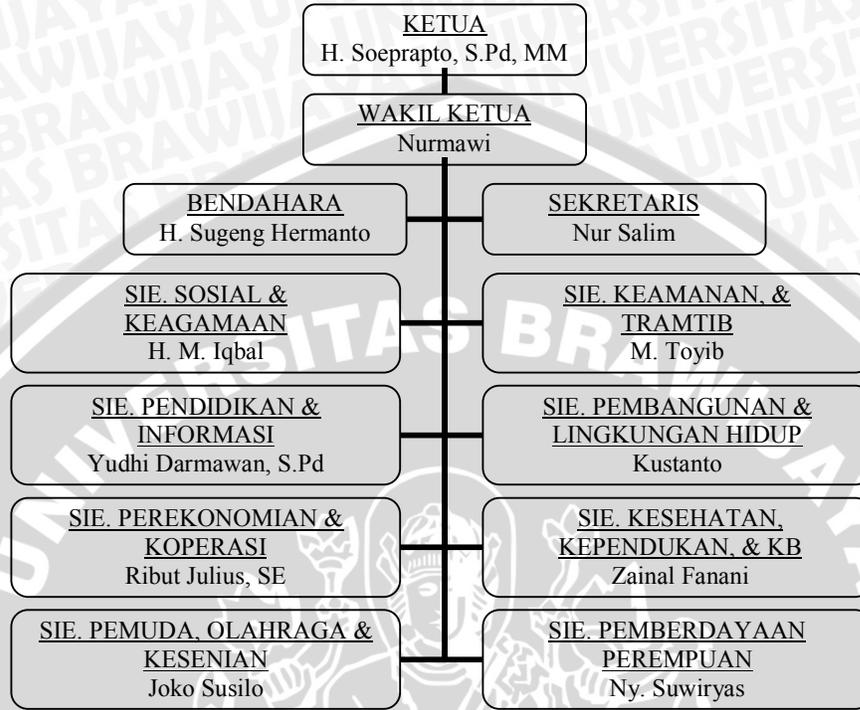
Tabel 4.6
Daftar Nama
Badan Permusyawaratan Desa Wonosari

No	Nama	Jabatan	Surat Keterangan Pengangkatan	
			Dari	Nomor
1	Soebiyantoro	Ketua	Bupati	140/01/HK/431.012/2007
2	Watjipto	Wakil Ketua	Bupati	140/01/HK/431.012/2007
3	H. Kusno	Sekretaris	Bupati	140/01/HK/431.012/2007
4	Hj. Sugiarti	Anggota	Bupati	140/01/HK/431.012/2007
5	H. Karnoto	Anggota	Bupati	140/01/HK/431.012/2007
6	Kadaryono	Anggota	Bupati	140/01/HK/431.012/2007
7	Timbul H	Anggota	Bupati	140/01/HK/431.012/2007

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Jumlah personel Badan Permusyawaratan Desa 7 Orang tersebut sama dengan jumlah dusun yang ada di Desa Wonosari, jadi masing-masing dusun menempatkan perwakilannya dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wonosari. Kemudian berikut ini adalah mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari



Sumber Kantor Desa Wonosari

Tabel 4.7
Daftar Nama
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Wonosari

No	Nama	Jabatan
1	H. Soeprapto, S.Pd, MM	Ketua
2	Nurmawi	Wakil ketua
3	Nur Salim	Sekretaris
4	H. Sugeng Hermanto	Bendahara
5	H. M. Iqbal	Sie. Sosial dan Keagamaan
6	M. Toyib	Sie. Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban
7	Yudhi Darmawan, S. Pd	Sie. Pendidikan dan Informasi
8	Kustanto	Sie. Pembangunan dan Lingkungan Hidup
9	Ribut Julius, SE	Sie. Perekonomian dan Koperasi
10	Zainal Fanani	Sie. Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
11	Joko Susilo	Sie. Pemuda, Olahraga, dan Kesenian
12	Ny. Suwiryas	Sie. Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagai mitra kerja untuk menggerakkan pembangunan desa yang dinamis. Berdasarkan Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 30 ayat 1 bahwa pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari terdiri dari unsur-unsur antara lain pemuka adat, agama, pendidik/cendekiawan, pemuda, wanita, dan pemimpin Lembaga Kemasyarakatan lain yang ada di desa.

Walaupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun pada prinsipnya lembaga ini tidak termasuk lembaga formal dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu sekumpulan tokoh-tokoh masyarakat ini dapat dikatakan sebagai para elit informal di Desa Wonosari, dimana secara nyata mereka mempunyai kewenangan dan kesempatan besar untuk dapat berperan dalam pembangunan desa Wonosari. Dari nama-nama yang tergabung dalam kepengurusan Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa Wonosari, beberapa di antaranya penulis pilih sebagai nara sumber dalam penelitian ini berdasarkan kapasitas dan partisipasi mereka dalam koridor pembangunan desa, ditambah dengan informasi dan referensi dari pihak-pihak atau masyarakat yang mengerti tentang penelitian ini.

4. Pembanguna Desa

Pemerintah Desa Wonosari telah melaksanakan pembangunan di wilayahnya, baik itu berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Proyek pembangunan tersebut terencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Adapun berikut ini adalah pembangunan fisik yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Wonosari:

Tabel 4.8
Proyek Pembangunan Fisik
Desa Wonosari dalam APB Desa
Periode 2007

No	Jenis Proyek	Volume (m ²)	Biaya (Rp)	Prosentase Penyelesaian (%)
1	Rehab kantor desa		14000000	100
2	Rehab pasar		17574000	97
3	Bantuan proyek 7 dusun		8000000	100
4	Liingar lapangan	3m x 100m	40000000	100
5	Jalan paving Mesagi	2,5m x 180m	60000000	60
6	Jalan Karanganyar	2,5m x 70m	15000000	100
7	Paving Wonosari Tengah	3m x 110m	30000000	100

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Pelaksanaan proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan merupakan bentuk upaya Pemerintah Desa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai. Namun perbaikan fisik dalam bidang perbaikan akses atau jalan kampung belum merata, sebab baru dilaksanakan di Dusun Mesagi, Dusun Karanganyar, dan Dusun Wonosari Tengah, berarti masih tersisa 4 dusun lagi yang belum mendapat bagian proyek perbaikan jalan. Sedangkan pembangunan non fisik yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Proyek Pembangunan Non Fisik
Desa Wonosari dalam APB Desa
Periode 2007

No	Jenis Proyek	Volume (m ²)	Biaya (Rp)	Prosentase Penyelesaian (%)
1	Pembinaan PKK		3500000	100
2	Pembinaan HANSIP		2700000	100
3	Karang Taruna		2000000	100

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Sedangkan pelaksanaan proyek pembangunan non fisik dapat dikatakan memberikan dampak yang positif. Kegiatan rutin PKK membawa misi pemantaban program Keluarga Berencana untuk menekan

tingginya angka kelahiran, dan juga meningkatkan kesehatan dan gizi balita dan ibu hamil. Pembinaan Hansip yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban desa serta penanggulangan bencana alam dan kecelakaan berjalan dengan baik, selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi tindakan kriminal dan kecelakaan seperti kebakaran dan sebagainya. Sedangkan program pembinaan kepemudaan karang taruna berjalan dengan sangat baik, keberadaan mereka membawa manfaat besar dalam pelaksanaan kegiatan desa.

5. Sosial Kemasyarakatan

Penyelenggaraan program desa di bidang sosial kemasyarakatan saat ini telah dan dalam proses pelaksanaan, hal ini sangat penting dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan tersebut ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana desa. Adapun berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Desa Wonosari:

Tabel 4.10
Sarana Pendidikan di Desa Wonosari

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD/ sederajat	4
2	SLTP/ sederajat	2
3	SMU/ sederajat	1
	Jumlah	7

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Ditinjau dari jumlah penduduk kelompok usia 0 sampai dengan 14 tahun adalah 843 jiwa maka pemenuhan sarana pendidikan termasuk memadai dengan lokal 2 SD/ sederajat dan 1 SLTP/ sederajat. Sedangkan jumlah kelompok usia 15 sampai dengan 19 tahun adalah 497 jiwa, juga tergolong memadai dengan jumlah 1 lokal SMU/ sederajat. Adapun mengenai sarana peribadatan di Desa Wonosari sebagai berikut:

Tabel 4.11
Sarana Peribadatan di Desa Wonosari

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Langgar	12
3	Musholla	8
4	Gereja	2
5	Pura/Kuil	0
	Jumlah	26

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Pemenuhan kebutuhan rohaniah masyarakat terpenuhi dengan baik, tersedia semua jenis tempat peribadatan di Desa Wonosari, kecuali Pura dan Kuil tidak ada karena jumlah pemeluk agama tersebut sangat minim. Kemudian untuk organisasi sosial dan organisasi masyarakat berkembang dengan baik. Berikut ini adalah daftar organisasi-organisasi tersebut:

Tabel 12
Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Desa Wonosari

No	Jenis Organisasi	Jumlah
1	Remaja Masjid	4
2	Pemuda Gereja	1
3	Karang Taruna	1
4	Yayasan	1
5	Panti Asuhan	2
6	Jama'ah Tahlil	15
7	Jama'ah Diba'	5
8	LPMD	1
9	BKM (P2KP)	1
	Jumlah	31

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Di Desa Wonosari memang sebagian besar masyarakatnya senang dengan kegiatan organisasi. Hal ini tergambar jelas dari banyaknya organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Masyarakat Wonosari cenderung lebih tertarik bergabung dalam organisasi atau perkumpulan yang bergariskan agama.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin di wilayah Desa Wonosari, setidaknya terdapat tiga program pemerintah yang diberlakukan antara lain:

Tabel 4.13
Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Wonosari

No	Jenis Kegiatan	Jumlah KK	Keterangan
1	ASKES GAKIN	231	778 orang
2	RASKIN	156	
3	BLT	186	

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Wonosari Periode 2007

Jumlah masyarakat miskin tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Desa Wonosari. Hal ini merupakan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wonosari termasuk dalam kategori masyarakat sejahtera.

B. Eksistensi Elit Informal dalam Masyarakat

Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa elit informal dalam hal ini adalah elit politik, elit cendekiawan, elit pemuda, dan elit ekonomi secara umum, ditinjau dari segi sosial budaya tergambar fenomena kultural. Elit informal dijadikan panutan dan sering menjadi patokan dalam suatu keberhasilan pembangunan desa. Itulah yang membuat elit informal mempunyai pengaruh. Pengaruhnya tidak dapat disamakan dengan elit formal, sebab ia tidak dapat dipastikan mempunyai batas administratifnya, sebagaimana pengaruh yang diberikan atau dimiliki elit formal atau elit kekuasaan politik.

Pada bagian ini penulis menyajikan data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang representatif dan pengamatan langsung terhadap fenomena sosial atau peristiwa, untuk menjelaskan keberadaan elit informal di lokasi penelitian. Mengenai kata elit dalam masyarakat setempat adalah “orang terpondang”.

Oleh karena elit informal selalu tergambar fenomena kultural maka dapat dikatakan elit informal yang ada di lokasi penelitian disebut juga elit kebudayaan yang diorganisir secara informal terdiri atas pemimpin, maka dalam kapasitas sebagai pemimpin, ia tidak dapat memberikan perintah dengan gaya otoriter melainkan mempengaruhi, meyakinkan, serta membujuk atas dasar kekuatan dan kepribadian yang dimiliki, senantiasa dipadukan dengan kepribadian masyarakat.

Untuk mengetahui gambaran tentang keberadaan elit informal di lokasi penelitian, penulis menyajikan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan

yaitu bapak Teguh Suwandono di kediamannya yang juga berada di lingkungan Desa Wonosari, sebagai berikut:

“...Orang terpandang yang ada di desa ini ada dua macam, yaitu pertama, kelompok terpandang resmi. Mereka ini adalah kepala desa dan seluruh staf, serta mereka yang berkecimpung dalam BPD. Kemudian beberapa pegawai kecamatan yang menetap di desa ini. Kedua, kelompok terpandang tidak resmi, yaitu tokoh agama atau kyai, ustadz, para guru SD, SMP, SMA dan pengusaha atau pedagang, termasuk juga petani-petani kaya. Khusus tentang kelompok terpandang tidak resmi yang saya sebut tadi, keberadaan mereka sangat baik, dalam arti dihormati masyarakat di sini. Tetapi menurut saya yang lebih terpandang adalah kyai, sebab mereka bertanggungjawab sebagai panutan dalam bidang agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.” (Wawancara pada tanggal 1 November 2007)

Memperkuat pengakuan Bapak Teguh tersebut maka peneliti mewawancarai bapak Kasiadi staf Kecamatan Tutur yang kebetulan sedang bertamu di kediaman Bapak Teguh. Pada intinya beliau mendukung pernyataan Bapak Teguh, sebagai berikut:

“...Saya sependapat dengan pendapat Pak Teguh tersebut, memang elit informal yang telah disebutkan tersebut diantaranya kyai dan orang-orang pengusaha kaya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu dihargai dan dihormati oleh masyarakat karena mereka itu jujur, pintar atau kaya. Sehingga kelebihan tadi membuat masyarakat menganggap mereka sebagai orang-orang terkemuka. Secara umum keberadaan mereka dalam masyarakat mempunyai kapasitas yang sama yaitu sebagai tokoh masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 1 November 2007)

Dari kedua penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di lokasi penelitian ternyata ada dua kelompok elit (formal dan informal). Terlepas dari elit formal, ternyata kelompok elit informal diakui dan dipandang terhormat oleh masyarakat.

C. Peranan Elit Informal dalam Pembangunan Desa

Sebagaimana fokus penelitian yang telah ditentukan, selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian sesuai dengan batasan studi terhadap peranan para elit politik, elit cendekiawan, elit pemuda, dan elit ekonomi dalam pembangunan desa Wonosari. Sedangkan untuk mendapatkan informasi mengenai siapa sajakah orang-orang yang dianggap sebagai para elit informal atau tokoh

masyarakat, maka penulis mewawancarai Kepala desa Wonosari, yaitu Bapak Bambang Irawan di Kantor Desa Wonosari, sebagai berikut:

”...Di Desa Wonosari ini ada beberapa orang yang dianggap tokoh masyarakat atau dalam bahasa sampeyan disebut elit informal. Yang menjadi tokoh politik ada Pak Ulul Azmi simpatisan PKB dan Pak Agus Prayitno mantan anggota DPRD. Kemudian tokoh cendekiawan atau orang-orang berilmu itu ada ulama paling disegani di sini Pak Kyai Khusairi, Pak Yudhi Darmawan guru SMU dan Pak Suhudi yang aktif sekali di beberapa LSM Kabupaten. Lalu tokoh pemuda yaitu teman sampeyan sendiri Mas Gagut Agus ketua karang taruna. Nah kalo tokoh ekonomi, di sini banyak pengusaha atau petani kaya, tapi menurut saya yang baik karena sering terlibat dalam kegiatan desa adalah Mas Ribut Ketua Paguyuban budidaya Bunga Krissan.” (Wawancara pada tanggal 2 November 2007)

Sebelumnya penulis juga mendapatkan masukan dari Bapak Teguh Suwandono, sebagai berikut:

”...Menurut saya elit politik disini adalah Pak Ulul Azmi yang sampai saat ini masih aktif sebagai anggota DPC PKB Pasuruan. Kemudian elit cendekiawan yang mempunyai peran paling besar adalah dari golongan ulama’ yaitu Kyai Haji Khusairi. Sebagai tokoh ekonomi adalah Pak Hantoko petani kaya yang sangat disegani dan Pak Watjip yang seringkali memberikan bantuan material dalam pembangunan fisik desa pada khususnya.” (Wawancara pada tanggal 1 November 2007)

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan tersebut, maka penulis melakukan observasi terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat atau kelompok elit informal. Dalam hal ini penulis menggunakan kejelian penulis sendiri untuk menentukan siapa sajakah kelompok elit informal yang akan menjadi nara sumber. Berikut adalah nama-nama kelompok elit informal yang ada di desa Wonosari:

Tabel 4.14
Daftar Nama Kelompok Elit Informal di Desa Wonosari

No	Nama	Pekerjaan	Kelompok Elit
1	Drs. Ulul Azmi	Anggota Parpol	Elit Politik
2	Agus Prayitno, SH	Mantan anggota DPRD	Elit Politik
3	KH. Khusairi	Ulama	Elit Cendekiawan
4	Yudhi Darmawan, S.Pd	Guru	Elit Cendekiawan
5	Gagut Agus, SP	Ketua Karang Taruna	Elit Pemuda
6	Hantoko	Petani dan pengusaha	Elit Ekonomi
7	Ribut Julius, SE	Petani	Elit Ekonomi
8	Watjip	Pedagang	Elit Ekonomi

1. Penentuan arah pembangunan desa

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sejauh mana peranan elit informal melalui kekuatan pengaruh yang dimilikinya untuk merangsang partisipasi masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dalam menentukan ke mana arah orientasi pembangunan desa yang akan dilaksanakan atau perumusan kebijakan tertentu yang berhubungan dengan pembangunan desa.

a. *Elit Politik*

Untuk mendapatkan data mengenai peranan elit informal politik, berikut adalah wawancara dengan Bapak Ulul Azmi:

”...Memang sudah menjadi tugasnya elit-elit politik menyampaikan aspirasi masyarakat, jadi biasanya mereka memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan walaupun ada juga yang sering berseberangan. Bagi saya, kedekatan hubungan dengan pemerintah desa akan sangat penting, sehingga akan terjadi suatu sinergi yang berpotensi mempengaruhi kebijakan desa demi kesejahteraan masyarakat, mengingat kami-kami inilah yang sedikit banyak mengetahui keinginan masyarakat. Aspirasi yang ditampung bisa disampaikan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. Tapi menurut saya akan lebih mengena ketika disampaikan dalam situasi tidak resmi, seperti ketika berbincang-bincang dengan Kades saat bertamu ke rumahnya.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Kemudian sekali lagi Bapak Ulul Azmi memberi pernyataan tambahan sebagai berikut:

”...Alur peranan elit politik mungkin seperti ini, aspirasi masyarakat desa atau pribadi kami sampaikan kepada LPM sehingga nanti bisa dibahas dalam agenda rapat. Walaupun memang dalam tubuh LPM tidak ada elit poliik, tetapi kami memiliki hubungan baik dan pada dasarnya memiliki kesamaan visi dan misi. Menurut hemat saya, mereka sangat kooperatif dengan kami. Selanjutnya secara fungsional pihak LPM yang akan merumuskannya bersama Pemerintah Desa”. (Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2008)

Selanjutnya penulis mewawancarai elit politik yang lainnya di Desa Wonosari yaitu Bapak Agus Prayitno di kediamannya, sebagai berikut:

”...Peranan elit politik di sini juga sebagai perantara, setelah mengantongi aspirasi masyarakat dan menyaringnya tentang baik dan buruknya apabila benar-benar dilaksanakan nantinya, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah desa, lebih enak langsung kepada Kades. Sebagai contoh nyata tentang Program Wonosari Desa Wisata, adalah hasil pemikiran rekan-rekan yang dimotori Pak Azmi dengan didasari adanya potensi Wonosari yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga dibentuklah Lembaga Desa Wisata (LADEWI) dengan tujuan memperjuangkan Wonosari menjadi Desa Wisata.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Bapak Agus Prayitno juga memberikan pernyataan tambahan sebagai berikut:

”...Dalam prakteknya kerja sama kami tentu saja dengan LPM, sebab ini memang menjadi tugas mereka. Hanya saja kami juga menjalin komunikasi dengan Pemerinaha Desa langsnug agar bisa memantau sejauh mana perkembangannya, ya memang hubungan kami dekat”. (Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2008)

Sebagai tambahan informasi bahwasanya di lokasi penelitian telah dicanangkan suatu program yang bertajuk *”Wonosari Mekar sebagai Desa Wiasata Alam dan Budaya, Sabuk Wisata Gunung Bromo”*, suatu program pemerintah desa wonosari guna mengoptimalkan potensi alam dan kebudayaan masyarakat sebagai desa tujuan wisata dalam rangkaian paket wisata Gunung Bromo. Untuk merealisasikan program tersebut, maka pemerintah desa Wonosari membentuk Lembaga Desa Wisata (LADEWI) *”Wonosari Mekar”* yang melibatkan banyak elemen masyarakat termasuk di dalamnya para kelompok elit informal, bahkan lebih spesifik lagi menurut beberapa informan yang representatif bahwa pembentukan lembaga tersebut adalah hasil ide dan perjuangan Bapak Ulul Azmi yang merupakan tokoh elit politik di lokasi penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis juga menghadiri rapat pembentukan pengurus Lembaga Desa Wisata tersebut pada tanggal 1 Februari 2008 di Aula Balai Desa Wonosari. Dalam rapat yang dibuka oleh Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Desa Wonosari tersebut, terpilih nama Ribut Julius sebagai Ketua LADEWI. Perlu diketahui

bahwa nama terakhir adalah salah satu kelompok elit ekonomi yang nantinya juga menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

Berdasarkan pernyataan dari kedua elit politik dan uraian di atas dapat diketahui bahwa kelompok elit politik di lokasi penelitian mempunyai peranan terhadap penentuan arah pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan beberapa elit politik di lokasi penelitian dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat dalam menentukan suatu program pembangunan desa walaupun pada kenyataannya secara struktural mereka tidak memiliki kekuasaan formal, namun dengan keahliannya mampu ikut mempengaruhi kebijaksanaan yang akan ditetapkan pemerintah desa.

b. *Elit Cendekiawan*

Beralih kepada elit selanjutnya, yaitu elit cendekiawan, penulis memperoleh keterangan dari kedua tokoh cendekiawan yang dipilih, pertama Bapak Khusairi seorang kyai terpadang di desa Wonosari, beliau menyatakan bahwa:

”...Orang-orang pemerintahan sering datang kepada saya, kadang hanya sekedar bersilatullah, namun tidak jarang sering membicarakan tentang pemerintahan. Tidak terkecuali Pak Kades juga sering meminta pertimbangan mengenai program-program pembangunan baru yang hendak dilaksanakan di desa ini. Saya ini bukan orang politik, jadi saya hanya memberi masukan baik buruknya dari sudut pandang yang saya pahami yaitu agama Islam. Selanjutnya keputusan ada di tangan pemerintah desa sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan nilai dan norma agama tentu kami akan sangat mendukung. Akan tetapi jika diminta untuk terlibat dalam kegiatan desa saya dengan senang hati tentu akan membantu sebisanya.” (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Kedua adalah keterangan dari Bapak Yudhi Darmawan seorang guru dan juga pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari yang dikenal tidak hanya kritis, namun juga aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat di lingkungan desa Wonosari, bahwa:

”...Saya selalu mengamati perkembangan desa, sering juga menganalisa kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan juga memberi *input suggestion* atau memberi pertimbangan dari segi keilmuan. Apabila kebijakan tersebut tidak memihak kepada kesejahteraan masyarakat, maka kami berada di

barisan terdepan yang akan menolak dilaksanakannya kebijakan tersebut. Namun jika itu kami pandang baik pasti kami akan mendukung sepenuhnya untuk realisasinya. Di LPM sendiri ada bagian ini, namun bagian saya bukan di situ, jadi saya sekedar mendukung dan membanu saja“ (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Berdasarkan keterangan dari kedua nara sumber di atas, dapat diketahui bahwa elit cendekiawan di lokasi penelitian dalam menentukan arah pembangunan desa adalah tidak berperan secara langsung. Maksudnya peranan mereka bukan berupa keterlibatan langsung dalam proses pembuatan suatu program pembangunan, namun pengaruh mereka tetap dibutuhkan pemerintah desa dalam bentuk dukungan terhadap program yang akan jika dilaksanakan agar dapat diterima oleh masyarakat desa. Dalam artian apabila suatu program tidak mendapat dukungan dari para elit cendekiawan, tidak jarang program tersebut sulit diterima oleh masyarakat, khususnya restu dari kyai di lokasi penelitian sudah menjadi kebiasaan, bahkan keharusan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menuntut adanya hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan kelompok elit cendekiawan agar suatu program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

c. *Elit Pemuda*

Sebagaimana desa-desa yang lainnya, di lokasi penelitian juga terdapat elemen pemuda yang mempunyai keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan desa. Mereka tergabung dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna di bawah asuhan Kepala Desa Wonosari, bernama “*Nongkojajar Youth*“ yang berdiri pada 1 November 2004. Saat ini penulis melakukan penelitian ini, organisasi tersebut diketuai oleh Gagut Agus. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis memilihnya menjadi nara sumber sebagai kelompok elit pemuda.

Untuk mengetahui peranan kelompok elit pemuda, penulis melakukan wawancara dengan Saudara Gagut Agus, sebagai berikut:

”...Hingga saat ini, kami para kaum muda belum pernah terlibat dalam konteks tersebut, maksud kami di sini adalah secara resmi

melakukan konspirasi legal secara politis. Dalam aplikasinya tanpa canggung kami sering mengutarakan ide-ide yang menurut analisa kami adalah baik, sebab jika sekedar usul tanpa disertai konsep pendukung atau dasar yang menguatkan seperti latar belakang serta kelebihan dan kekurangannya secara logis, maka sudah pasti hanya akan menjadi perbincangan semata. Sudah bukan rahasia lagi kami-kami yang muda ini sering dipandang sebelah mata, tentunya tidak mau terus-terusan seperti itu. Srtateginya adalah berpartner dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten di bidangnya guna mendapatkan dukungan.” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008)

Keterangan dari nara sumber di atas memberikan gambaran bahwa elit pemuda di lokasi penelitian juga turut berperan dalam penentuan arah pembangunan desa, walaupun dalam pelaksanaanya kelompok elit ini tidak selalu tampil di permukaan yaitu dengan cara menjalin kerja sama dengan kelompok elit lainnya yang dianggap lebih mempunyai pengaruh terhadap pemerintah desa. Berdasarkan keterangan dari beberapa pengurus karang taruna setempat, bahwasanya mereka lebih sering bekerjasama dengan kelompok elit politik dan ekonomi, sebab mereka memang berkompeten di bidangnya dan mempunyai kharisma yang besar untuk dapat mempengaruhi pemerintah desa.

d. *Elit Ekonomi*

Seperti halnya penjelasan pada kelompok-kelompok elit sebelumnya, berikut akan disajikan hasil wawancara dengan tokoh elit pada bagian ini, yaitu tokoh-tokoh elit ekonomi yang dipilih menjadi nara sumber. Adapun berikut berturut-turut adalah hasil interview dengan Bapak Hantoko, Bapak Ribut Julius, dan terakhir dengan Bapak Watjip di kediaman masing-masing.

Bapak Hantoko menyatakan bahwa:

”...Akan menjadi suatu kebanggaan seandainya bisa ikut berpartisipasi dalam memikirkan masalah pembangunan, namun pada prakteknya memang jarang dilibatkan dalam urusan pemerintah, apalagi sampai mengeni penentuan arah pembangunan. Kami lebih sering diposisikan sebagai pihak pendukung untuk mencapai tujuan mungkin karena kami kaya dan disegani masyarakat sini, misalnya dalam urusan perekonomian

dan kesejahteraan rakyat tertentu kami tiba-tiba dilibatkan, tentang perencanaan programnya kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Tetapi sebagai warga kami tidak akan keberatan selama itu untuk kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Kemudian Bapak Ribut Julius menyatakan bahwa:

”...Kapasitas saya adalah di bidang ekonomi, apapun yang saya donasikan kepada pembangunan desa ini berdasarkan perspektif di bidang ekonomi, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada khususnya. Jika ada program pemerintah yang berkenaan dengan bidang ekonomi, saya dan teman-teman memang selalu dilibatkan dalam pelaksanaannya tapi bukan pada saat perencanaannya, konseptor atau perencananya tetap pemerintah desa.” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Dan yang terakhir adalah pernyataan dari Bapak Watjip, sebagai berikut:

”...Karena alasan kesibukan saya hampir tidak pernah terlibat dengan kegiatan desa, berkali-kali dapat undangan rapat dari desa tapi untuk menghadirinya saja sering berhalangan. Sebenarnya saya ingin sekali terlibat, tapi dalam keadaan tertentu mungkin saya hanya bisa berpartisipasi dengan cara saya sendiri sebisanya, akan mengikuti perkembangannya tidak dari dekat. Bagi saya masih banyak bentuk partisipasi yang mungkin bisa diupayakan selain dalam hal ini.” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008)

Uraian-uraian di atas menggambarkan bahwa kelompok elit ekonomi di lokasi penelitian tidak mempunyai peranan dalam penentuan arah pembangunan desa. Menurut mereka hal ini disebabkan karena para elit ekonomi tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan program atau kebijakan pembangunan oleh pemerintah desa, adanya anggapan bahwa kemampuan mereka hanya dikhususkan di bidang ekonomi saja, dan amat banyaknya kesibukan yang membuat menjadi sedikitnya waktu untuk berperan.

2. Pemecahan permasalahan pembangunan desa

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai peranan elit informal sebagai tokoh masyarakat yang menjalankan fungsinya sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai

pembangunan desa. Mengingat status sosial mereka yang dipandang terhormat di mata masyarakat, maka kondisi ini memungkinkan masyarakat menganggap mereka sebagai orang-orang yang mengetahui banyak hal, dalam hal penelitian ini adalah mengenai permasalahan-permasalahan seputar pembangunan desa.

a. *Elit Politik*

Adapun hasil wawancara penulis dengan tokoh elit politik, Bapak Ulul Azmi adalah sebagai berikut:

”...Dengan adanya dialog dan diskusi bersama diharapkan tercipta solusi, yang akan menjadi pemecah kebuntuan sehingga kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diatasi sesuai dengan harapan banyak pihak khususnya bagi masyarakat. Dan seharusnya memang setiap elemen masyarakat tanpa diminta sudah memiliki kesadaran untuk ikut andil memikirkan solusi terbaik karena pada akhirnya kembali pada tujuan semula yaitu untuk kesejahteraan bersama.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Dan pernyataan Bapak Agus Prayitno, sebagai berikut:

”...Di dalam pelaksanaan pembangunan pasti akan menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini sudah barang tentu menuntut adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat, jika tidak maka pemerintah desa sendiri yang akan memikul beban berat. Apabila itu terjadi sangat mungkin hasil yang dicapai pun kurang maksimal, terlebih ditakutkan bertentangan dengan keinginan masyarakat. Sebagai wakil masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Pernyataan dari kedua nara sumber di atas menegaskan bahwa kelompok elit informal politik masih mempunyai peranan aktif untuk memberi pemecahan terhadap permasalahan pembangunan desa di lokasi penelitian. Keberadaan mereka akan sangat menguntungkan apabila mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa untuk dapat bekerjasama melaksanakan pembangunan desa.

b. *Elit Cendekiawan*

Apabila dilihat keberadaan mereka di masyarakat dianggap terpendang karena mereka memiliki citra diri yang melekat sebagai orang-orang yang pandai, memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dalam kaitannya dengan fokus ini, maka seyogyanya mereka

mempunyai peranan yang besar, baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Di sini mereka mengemban tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan agar tidak hanya bisa menerima tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi di dalamnya.

Berikut ini adalah hasil penuturan Bapak Kyai Haji Khusairi, yang menyatakan bahwa:

”...Setiap umat di muka bumi mengemban amanah berdakwah, hukumnya wajib untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki agar bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal pembangunan juga begitu, agama menganjurkan kita untuk selalu membangun. Oleh sebab itu kita tidak perlu segan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah desa mengenai masalah-masalah tertentu dalam pembangunan. Sebagai buktinya para petinggi desa sering datang ke sini untuk meminta pertimbangan. Kemudian dalam ceramah-ceramah agama yang saya lakukan sering saya selipkan pesan-pesan semangat untuk senantiasa membangun agar para jamaah juga memahami betapa pentingnya pembangunan.” (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Kemudian dilanjutkan dengan kutipan pernyataan dari Bapak Yudhi Darmawan, sebagai berikut:

“...Hasil analisa yang kami lakukan pasti akan disampaikan kepada pemerintah desa dengan maksud agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan strategis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, dan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang program yang dilaksanakan sehingga tercapai kesamaan visi dan misi, jika sudah demikian maka pertentangan kepentingan dengan masyarakat dapat diminimalisir, sebab suatu program pasti akan menuai pro dan kontra.” (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Sesuai dengan prediksi sebelumnya, bahwa benar adanya kelompok elit informal cendekiawan di lokasi penelitian mempunyai peranan besar dalam upaya pemecahan permasalahan pembangunan desa. Pengaruh dan kemampuan intelektual mereka memungkinkan membuat masyarakat menaruh harapan besar agar supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan bersama. Keberadaan mereka juga sangat dibutuhkan pemerintah desa sebagai

elemen penting di luar kekuasaan formal dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan desa.

Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Kepala Desa, sebagai berikut:

“...Seandainya mengalami pertentangan dengan masyarakat, kami selalu menggandeng para tokoh masyarakat, khususnya ulama, untuk meredam gejolak agar tidak mengarah terjadinya konflik yang mengarah kepada tindakan kekerasan. Selama ini langkah tersebut ternyata sangat efisien, sebab masyarakat sangat segan terhadap mereka.” (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Hal ini semakin menegaskan bahwa betapa pentingnya peranan mereka agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa, menjaga hubungan baik dan menjadikan mereka sebagai rekanan yang dapat diandalkan mampu memberi solusi dan atau menhadi solusi permasalahan.

c. *Elit Pemuda*

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Saudara Gagut Agus, yang menyatakan bahwa:

”...Dalam hal ini golongan pemuda tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah desa, mungkin juga karena masih muda-muda jadi muncul asumsi bahwa kapasitas dan pengalaman kami masih minim. Dengan fenomena seperti ini sulit rasanya untuk terlibat dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi. Namun pada dasarnya kami percaya pemerintah desa mempunyai kemampuan untuk itu, sebab dalam pelaksanaannya mereka didampingi tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, berkemampuan, dan disegani masyarakat. (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008)

Pernyataan dari Saudara Gagut Agus di atas menggambarkan bahwa di lokasi penelitian, kelompok elit pemuda tidak mempunyai peranan dalam pemecahan permasalahan pembangunan. Pemerintah desa setempat tidak pernah melibatkan kelompok elit ini, sedangkan untuk terlibat dengan inisiatif sendiri adalah sesuatu yang sulit. Keadaan ini disebabkan pemerintah desa lebih memilih untuk melibatkan kelompok masyarakat yang dinilai lebih sesuai untuk memecahkan permasalahan, yang mempunyai kemampuan dan

kekuatan pengaruh yang lebih besar di mata masyarakat. Akan tetapi, dalam keadaan yang lain pula tidak menutup kemungkinan pemerintah desa lebih memilih kelompok pemuda ini untuk memberdayakan keberadaan dan peranannya.

d. *Elit Ekonomi*

Selanjutnya adalah gambaran mengenai peranan kelompok elit ekonomi. Adapun berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kelompok elit ekonomi desa setempat. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Hantoko, sebagai berikut:

”...Kalau soal itu saya sendiri belum pernah dan sepertinya tidak ingin ikut campur. Biar saja masalah itu ditangani yang memang berkewajiban dan ahli di bidangnya. Sebab saya ini hanya petani biasa, masih banyak orang-orang pintar di sini yang biasanya membantu, saya tahu betul itu, makanya saya percaya sepenuhnya mereka mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, tidak hanya masalah pembangunan tetapi juga masalah-masalah di bidang lainnya.” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Kemudian kedua, hasil wawancara dengan Bapak Ribut Julius, sebagai berikut:

”...Saya rasa peranan kelompok ekonomi pada bagian ini tidak ada. Setahu saya permasalahan yang dihadapi selalu diselesaikan sendiri oleh pemerintah desa. Apabila melibatkan pihak luar dikhawatirkan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sendiri, karena khawatir dianggap tidak mampu memecahkan masalah desa. Kalaupun ada yang dilibatkan, hanya orang-orang khusus seperti sesepuh desa, para ulama yang notabene mereka adalah orang-orang dekat pemerintah desa.” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Dan yang ketiga, adalah hasil wawancara dengan Bapak Watjip, sebagai berikut:

”...Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya biasa saja saya jarang terlibat, apalagi ini mengenai masalah serius macam pemecahan permasalahan pembangunan ya sudah bisa Anda tebak, saya tidak pernah berpartisipasi. Sebaliknya juga, pemerintah desa sendiri memang tidak pernah meminta pertimbangan atau sekedar berdiskusi dengan saya, maklum mungkin karena saya jarang menghadiri undangan rapat desa akibatnya saya terkesan tidak peduli.” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008)

Penjelasan-penjelasan dari ketiga kelompok elit ekonomi tersebut pada intinya adalah sama, yaitu menunjukkan bahwa kelompok elit ekonomi di lokasi penelitian tidak mempunyai peranan sehubungan dengan upaya-upaya pemecahan permasalahan pembangunan desa. Hal tersebut disinyalir disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak mengajak para kelompok elit ekonomi desa setempat untuk berpartisipasi dalam kepentingan tersebut. Selain itu juga disebabkan karena kelompok elit-elit ekonomi lebih mendahulukan kepentingan bisnis, sehingga muncul kesan bahwa mereka kurang peduli terhadap permasalahan desa

3. Pelaksanaan kegiatan desa

Sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan desa di sini adalah proses berlangsungnya suatu program, acara atau perhelatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa sejak awal hingga akhir pencapaian maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian akan diperoleh suatu pemahaman bahwa pada tahap ini akan disajikan data tentang sejauh mana peranan kelompok elit informal di lokasi penelitian di dalam pelaksanaan kegiatan desa yaitu mengenai keikutsertaan atau partisipasi mereka selama kegiatan tersebut berlangsung.

a. *Elit Politik*

Di bawah ini adalah pernyataan Bapak Ulul Azmi, sebagai berikut:

“...Terus terang saja pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa saya jarang turut berpartisipasi. Kecuali pada saat perencanaan memang hampir selalu terlibat, mengingat sebelum dilaksanakannya beberapa kegiatan desa saya dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain kerap diajak berdiskusi. Namun secara teknisnya biasanya dijalankan oleh tim bentukan pemerintah desa. Tim ini diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja di lapangan.”
(Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus Prayitno, Beliau menyatakan bahwa:

“...Dalam hal ini saya pantas berkecil hati. Sejujurnya saya katakan maaf saya tidak pernah terlibat selama pelaksanaan kegiatan desa. Maaf tadi adalah karena saya orang politik yang seperti kebanyakan insan politik di sini yang hanya ahli dalam konsep, akan tetapi untuk melaksanakannya adalah orang lain. Mungkin di kepala elit politik dihindangi virus arogansi secara normatif bahwa konseptor berbeda dengan *runner* (pelaksana).“ (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Berdasarkan pernyataan dari kedua nara sumber di atas dapat diketahui bahwa kelompok elit politik di lokasi penelitian tidak mempunyai peranan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Selama ini fenomena yang terjadi adalah mereka melakukan peranannya pada saat perencanaan suatu kegiatan, mereka bertindak sebagai konseptor bersama dengan pemerintah desa. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, mereka tidak turut terlibat sama sekali, bahkan muncul anggapan di mata masyarakat bahwa ada keengganan pada mereka untuk terlibat. Hal ini disebabkan karena adanya sikap arogan pada diri mereka yang merasa bahwa mereka tidak pantas menjadi pelaksana, tetapi lebih pantas sebagai pencetus, perencana, dan penasehat saja.

b. *Elit Cendekiawan*

Berikut akan disajikan hasil wawancara lanjutan dengan para tokoh elit cendekiawan. Bapak Kyai Haji Khusairi menyatakan bahwa:

”...Untuk saat ini saya sudah tidak mampu lagi untuk terlibat secara fisik, ya karena usia saya sudah semakin lanjut jadi kekuatan fisik juga semakin menurun. Tapi walaupun sudah seperti ini, masih saja tidak bisa lepas dari acara-acara di desa, Pak Kades itu selalu memasukkan nama saya dalam daftar kepanitiaan. Hanya bedanya sekarang sebagai penasehat teknis. Posisi itu tidak pernah berubah beberapa tahun ini, sudah jadi langganan. Saya tidak pernah keberatan kok, malah bahagia masih bisa berguna bagi orang banyak” (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Sedangkan Bapak Yudhi Darmawan memberi pernyataan yang sedikit berbeda, yaitu sebagai berikut:

”... Sebagai orang dekat Kepala Desa mana bisa saya menghindar bila ada kegiatan. Lagipula mumpung masih kuat fisik saya, daripada nanti jadi gunjingan orang-orang kalau tidak ambil bagian. Tapi bukan karena itu lho alasannya. Kebetulan saya ini

orangnya senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Saya nggak keberatan kalau harus keluar keringat, nah apalagi kalau acaranya senang-senang. Saya senang sebagai pelaksana, tidak harus sebagai ketua, tidak masalah kalau saja berada di bawah pimpinan rekan-rekan karang taruna, karena semua posisi adalah sama dan bagian dari tim serta punya tanggung jawab sendiri-sendiri. (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Pernyataan dari Bapak Kyai Haji Khusairi dan Bapak Yudhi Darmawan tersebut memberikan gambaran bahwa kelompok elit cendekiawan di lokasi penelitian mempunyai peranan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Keberadaan dan pengaruh mereka membuat mereka selalu dilibatkan oleh pemerintah desa. Mereka tidak hanya dibutuhkan pada posisi penasehat atau dalam kepanitiaan terlibat dalam *Steering Committee* (SC) saja, tetapi juga berperan sebagai pelaksana teknis atau *Organizing Committee* (OC).

Sebagai tokoh masyarakat yang dihormati di lokasi penelitian, secara tidak langsung mereka dituntut untuk selalu melakukan yang terbaik. Keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan desa akan berdampak positif, sebab status mereka sebagai panutan masyarakat akan membangkitkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan desa tersebut. Hal ini sudah disadari oleh pemerintah desa setempat sehingga dalam setiap kegiatan desa, para kelompok elit cendekiawan ini selalu dilibatkan.

c. *Elit Pemuda*

Adapun berikut adalah pernyataan dari nara sumber tunggal sebagai tokoh elit pemuda, yaitu Saudara Gagut Agus, sebagai berikut:

”...Organisasi karang taruna ini berada di bawah naungan pemerintah desa. Dengan kata lain kami ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah desa. Sekumpulan pemuda di lingkungan desa Wonosari tergabung dalam satu wadah diarahkan untuk berkeaktifitas dan melakukan aksi-aksi positif mendukung program pembangunan desa. Sudah barang kami dituntut untuk selalu aktif dalam berbagai kegiatan desa.” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008)

Dalam praktek pelaksanaannya para pemuda yang tergabung dalam karang taruna desa Wonosari masuk dalam kepanitiaan suatu

kegiatan tertentu. Sebagai contoh dalam kegiatan adat tahunan desa setiap 17 Agustus. Kegiatan ini berjalan turun temurun sejak zaman kolonialisme Belanda. Dalam acara ini terdiri dari ritual penguburan kepala sapi di tengah-tengah pasar desa Wonosari dan arak-arakan ancak raksasa yang berisi hasil bumi, makanan, jajanan pasar dan berbagai sumbangan dari warga Wonosari. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud syukur masyarakat Wonosari kepada Yang Maha Kuasa dan agar supaya selalu diberikn kemakmuran. Di tangan rekan-rekan karang taruna, sejak 2 tahun lalu acara ini dikemas dalam suatu rangkaian acara pesta rakyat dengan konsep yang berubah-ubah tiap tahunnya namun tidak meninggalkan sisi adat dan tradisi desa Wonosari. Beberapa modifikasi dilakukan misalnya menampilkan pawai kebudayaan tradisional desa yang memang berbeda-beda di setiap dusun, dan menampilkan hasil-hasil pertanian seperti apel, bunga krissan, kopi, dan sayuran-sayuran yang selama ini menjadi komoditi andalan Wonosari. Sehingga saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya bertujuan peringatan adat tahunan semata, namun juga berfungsi sebagai ajang untuk menarik wisatawan dan menampilkan berbagai potensi yang dimiliki desa Wonosari. Dengan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak sponsor, perjuangan rekan-rekan karang taruna telah membuahkan hasil dengan mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata Jawa Timur sehingga kegiatan tersebut tercatat dalam kalender wisata Jawa Timur seperti agenda upacara Kasodo yang sudah dikenal sebelumnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis juga terlibat dalam kepanitiaan periode 2007 sebagai Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat dan Sponsorship. Oleh karena itu penulis tidak kesulitan menggambarkan keterlibatan kelompok pemuda dalam berbagai kegiatan di desa Wonosari.

Beberapa uraian di atas memberikan gambaran bahwa kelompok elit pemuda di lokasi penelitian mempunyai peranan yang besar dalam berbagai pelaksanaan kegiatan desa. Keterlibata kelompok pemuda di lokasi penelitian memang sangat dibutuhkan dan terbukti mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil yang dicapai dari suatu kegiatan tertentu.

d. *Elit Ekonomi*

Adapun berikut adalah pernyataan Bapak Hantoko, sebagai berikut:

"...Saya sendiri tidak pernah lagi terlibat dalam kegiatan desa. Dalam hal pelaksanaannya terakhir saya terlibat 20 tahun lalu sebelum saya menikah. Kalau sekarang hal-hal semacam itu menjadi bagiannya anak-anak muda, di sini kan ada karang taruna. Saya bisa berpartisipasi dalam bentuk yang lainnya saja, bukan dalam teknis pelaksanaannya." (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Selanjutnya disusul oleh pernyataan dari Bapak Ribut Julius, sebagai berikut:

"...Secara pribadi saya memang tidak selalu bersedia untuk terlibat dalam pelaksanaan, sebelumnya saya menimbang mampu tidaknya jika saya ambil bagian. Tentunya saya punya keterbatasan dalam banyak hal, hanya dalam bidang ekonomi saya akan dengan segenap hati membantu sebab saya merasa di bidang itulah kemampuan saya." (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Sedangkan Bapak Watjip memberikan pernyataan sebagai berikut:

"...Saya tidak pernah ikut campur selama pelaksanaan kegiatan desa, kembali lagi karena masalah waktu yang terbatas. Tetapi yang jelas saya tetap memberikan dukungan dalam bentuk yang lain, saya rasa untuk pelaksana sudah ada orang-orang yang biasa melakukan tugas itu." (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa kelompok elit ekonomi di lokasi penelitian tidak mempunyai peranan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Hanya sebagian saja dari mereka yang bersedia terlibat yang berhubungan dengan dalam pelaksanaan kegiatan, namun hal itu hanya terbatas pada kegiatan perekonomian saja.

4. Bantuan material elit informal

Pada bagian ini penulis akan menyajikan data hasil penelitian mengenai peranan para elit informal dalam bentuk bantuan berupa material

yang menunjang peningkatan pembangunan desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa modal berupa material atau kekuatan modal finansial adalah faktor yang sangat vital dalam kegiatan pembangunan di mana pun, tidak terkecuali di lokasi penelitian. Oleh karena itu swadaya masyarakat akan sangat dibutuhkan guna meringankan beban pemerintah desa sendiri dari segi pembiayaan dan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut. Kelompok elit informal tidak luput dari fokus penelitian ini, sebab keberadaan dan pengaruh mereka diharapkan mampu menjadi panutan, memberikan contoh, dan menggugah hati nurani masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

a. *Elit Politik*

Adapun berikut adalah hasil wawancara dengan tokoh-tokoh elit informal politik. Pertama, pernyataan dari Bapak Ulul Azmi yang menyatakan bahwa:

”...Sebagai warga desa sini tentu tidak akan keberatan apabila diminta untuk memberi iuran atau sumbangan berupa materi asalkan keperluannya jelas atau transparan dalam penggunaannya kelak, dan yang paling penting adalah benar-benar dimaksudkan untuk tujuan pembangunan desa. *Toh*, nantinya juga kembali kepada masyarakat yang menikmati hasilnya. Sedangkan tugas tokoh masyarakat di sini adalah memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran sehingga dengan hati yang ikhlas melakukan swadaya. Masyarakat biasanya lebih mudah tergugah apabila yang dimaksudkan adalah pembangunan fisik sebab hasil langsung dapat terlihat dan dapat dinikmati bersama.”
(Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Sedangkan yang kedua adalah pernyataan dari Bapak Agus Prayitno, sebagai berikut:

”...Sebelumnya tanpa bermaksud tinggi hati, saya pribadi sering memberi bantuan material untuk pembangunan desa ini. Bahagia rasanya bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kesejahteraan bersama. Sekalian secara tidak langsung memberi contoh kepada masyarakat sekitar agar turut berpartisipasi. Pada dasarnya masyarakat desa sini tidak keberatan menyumbang sesuai kemampuan masing-masing, walaupun memang sebenarnya ada standar minimal tertentu sumbangannya. Para orang kaya di sini bahkan hampir selalu menyumbang dalam jumlah besar.”
(Wawancara pada tanggal 8 Februari 2008)

Pernyataan-pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa kelompok elit politik di lokasi penelitian juga memberikan bantuan material dalam pembangunan desa. Selain itu mereka menjalankan peranannya dengan baik untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut berpartisipasi membeiiikan bantuan material. Akibat contoh dan ajakan mereka maka masyarakat tidak lagi segan memberi dalam jumlah yang besar secara keseluruhan. Hal ini akan meminimalisir adanya kekhawatiran atau kecurigaan masyarakat mengenai penyelewengan yang mungkin saja terjadi. Rasa percaya akan timbul apabila tokoh masyarakat yang dihormati juga memberikan contoh berupa keikutsertaan atau partisipasi serupa.

b. *Elit Cendekiawan*

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Kyai Khusairi, yang menyatakan bahwa:

”...Sebagaiman diajarkan dalam agama Islam kita senantiasa dianjurkan untuk bershodaqoh menyisihkan sebagian harta kita. Saya yakin dalam agama apapun di dunia ini juga mengajarkan hal tersebut. *Nah*, apalagi untuk kepentingan pembangunan akan sangat mulia baik di mata Tuhan Yang Maha Esa. Saya sendiri akan berusaha dengan ikhlas memberi bantuan material walaupun nilainya tidak seberapa, yang terpenting bisa berguna untuk kepentingan umat.” (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Sedangkan Bapak Yudhi Darmawan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“...Menurut saya sebaiknya semua warga masyarakat mempunyai kesadaran untuk itu, jadi tidak hanya para tokoh masyarakat saja. Sebab apabila nanti diakumulasikan akan menghasilkan kuantitas yang besar yang tentunya akan lebih optimal dalam pemanfaatannya. Peran tokoh masyarakat yang lebih diutamakan di sini adalah bagaimana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk itu. Kalau contoh yang sudah ada, sebagian besar jalan desa dan bangunan fisik yang lainnya di desa ini adalah hasil swadaya masyarakat melalui arahan tokoh masyarakat di sekitarnya. Saya sendiri juga sebagai RT di sini sudah pernah menghimbau warga di lingkungan RT ini, hasilnya semua jalan atau gang sudah dipavingstone dan mendirikan pos ronda untuk keperluan penjagaan keamanan.” (Wawancara pada tanggal 9 Februari 2008)

Uraian-uraian dari kedua nara sumber di atas menunjukkan bahwa kelompok elit cendekiawan di lokasi penelitian turut memberikan bantuan material dalam pembangunan desa. Seperti halnya kelompok elit politik sebelumnya, mereka juga melakukan peranan sebagai motivator bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi juga dalam bentuk pemberian bantuan material. Melalui pengaruhnya mereka menghimbau warga masyarakat agar mau berswadaya melakukan upaya pembangunan, dalam hal ini adalah pembangunan fisik minimal di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

c. *Elit Pemuda*

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan nara sumber tunggal kelompok elit pemuda, Saudara Gagut Agus, sebagai berikut:

“...Untuk urusan ini kami belum dikenai kewajiban moral untuk memberi bantuan material. Sebab sebagian besar dari kami masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang notabene belum memiliki penghasilan tetap. Hanya sedikit orang anggota kami yang sudah bekerja, namun biasanya juga sudah diwakili oleh orang tua masing-masing untuk sumbangannya.” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008)

Dari penuturan nara sumber di atas dapat diketahui bahwa kelompok elit pemuda di lokasi penelitian tidak melakukan peranan pemberian bantuan material dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar dari mereka belum mempunyai penghasilan sendiri, dan masih bergantung kepada orang tua masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena yang ada ialah mereka lah yang sering ditunjuk untuk menarik sumbangan atau bantuan dari warga masyarakat.

d. *Elit Ekonomi*

Adapun berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Hantoko, menyatakan bahwa:

“...Alhamdulillah, saya diberikan rezeki yang lebih daripada orang-orang kebanyakan. Maka dari itu sudah seharusnya dipergunakan untuk membantu sesama. Dalam hal pembangunan desa saya selalu memberi bantuan material sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang dibutuhkan berupa uang tunai ya saya bantu uang, kalau yang dibutuhkan barang ya saya bantu barang.

Yang pasti saya tidak keberatan asalkan itu untuk kemajuan pembangunan desa ini, lagipula saya mencari rezeki juga dari tanah desa ini. Paling tidak inilah bentuk kepedulian dan terima kasih saya.“ (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ribut Julius, Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“...Tanpa diminta dengan inisiatif sendiri saya tidak lupa mengisi kas desa tiap bulannya, mengisi kas karang taruna, dan juga kas pengurus pembangunan masjid walaupun saya adalah umat kristiani. Ajaran untuk menjadi dermawan menjadi pendidikan sejak kecil dari orang tua saya. Berbagi dengan sesama makhluk Tuhan adalah keindahan dalam hidup. Sesungguhnya semangat untuk itu yang mendorong saya untuk dapat berbuat lebih banyak. Jika diminta untuk memilih bantuan seperti apa, saya lebih suka membantu dalam bentuk barang-barang tertentu. Misalnya untuk membangun jembatan saya lebih suka membantu dalam bentuk pasir, semen, dan lain-lain yang sekiranya dapat langsung dipergunakan.“ (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2008)

Sedangkan Bapak Watjip menyatakan bahwa:

“...Bentuk partisipasi seperti inilah yang selama ini saya bisa. Bagaimanapun juga saya sebenarnya juga memiliki kepedulian tentang pembangunan desa. Jika dalam banyak hal saya tidak bisa terlibat, maka dalam hal ini saya akan mengoptimalkan apa saja yang bisa saya perbantukan, tentunya dalam bentuk materi. Ada rapat desa saya tidak bisa hadir, ya saya kirimkan konsumsinya. Ada kegiatan desa, ya saya bantu pendanaannya. Ada perbaikan jalan, saya bantu bahan-bahan bangunan atau mungkin biaya tenaga kerjanya. Saya sangat senang jika bantuan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kepentingan umum.“ (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2008)

Berdasarkan uraian pernyataan dari ketiga nara sumber di atas dapat diketahui bahwa kelompok elit ekonomi di lokasi penelitian melakukan peranan dalam memberikan bantuan material dalam pembangunan desa.

ANALISA DATA

Pada bagian sebelumnya telah disajikan hasil penelitian yang penulis lakukan berupa data-data kasar mengenai gambaran nyata, fakta-fakta dan fenomena tertentu melalui penyajian hasil wawancara dengan beberapa nara

sumber dan pengamatan langsung penulis selama berada di lokasi penelitian. Kemudian pada bagian ini, data tersebut oleh penulis akan diolah, dianalisa dan disimpulkan dalam bentuk serangkaian kalimat dari sudut pandang penulis sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman baru mengenai peranan dari masing-masing elit informal dalam pembangunan desa. Berikut ini akan disajikan secara berturut-turut sesuai dengan fokus penelitian.

1. Penentuan arah pembangunan desa

a. *Elit Politik*

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ruang lingkup pembangunan desa, kelompok elit ini dikenal dengan sebutan “*legitimizer*” (mereka yang mengesahkan) kehendak politik desa, juga mengenai politik pembangunan yang hendak dianut dan diselenggarakan oleh masyarakat desa. Penentuan tentang arah maupun bidang pembangunan yang harus dilaksanakan pemerintah desa dilakukan oleh elit ini. Kelompok elit politik mempunyai ciri-ciri, yaitu menduduki posisi puncak pada organisasi politik di desa; rela berkorban, tempat anggota masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi tentang politik.

Dalam aplikasinya di lapangan mereka menggunakan kekuatan pengaruh yang mereka miliki dengan memanfaatkan keanggotaan mereka pada suatu organisasi politik tertentu. Keadaan ini secara tidak langsung membuat masyarakat menilai diri mereka sebagai sosok yang dihormati atau biasa disebut tokoh masyarakat. Kemudian dengan keahlian khusus mereka berusaha mempengaruhi masyarakat agar memperoleh dukungan mengenai segala sesuatu yang menjadi pemikirannya dalam bidang pembangunan. Visi dan misi ini secara otomatis menuntut adanya kedekatan hubungan dengan masyarakat desa sehingga akan memudahkan mempengaruhi, menjalankan strategi, dan sekaligus memahami keinginan masyarakat desa sendiri untuk dapat mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk menjalankan peranannya dalam penentuan arah pembangunan desa, mereka senantiasa membina hubungan baik dengan pemerintah desa sebagai pelaksana legal secara administratif

dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, tentang program-program pembangunan desa yang akan dilaksanakan.

Pada fokus penelitian ini peranan kelompok elit politik menempati porsi yang lebih besar daripada kelompok elit yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam bidang inilah sesungguhnya keahlian dan pengaruh mereka mampu dilaksanakan secara optimal. Sesuai dengan fakta yang ada, mereka telah menjalankan peranannya dengan sangat baik secara riil melibatkan diri dengan pemerintah desa dan proaktif dalam pembangunan desa. Sebagai contoh nyata seperti yang telah penulis gambarkan pada bagian hasil penelitian sebelumnya, yaitu peran aktif mereka dengan dilaksanakannya program “Wonosari Mekar”, desa Wonosari sebagai desa wisata. Tindak lanjut dari program ini adalah dibentuknya Lembaga Desa Wisata (LADEWI) “Wonosari Mekar” sebagai lembaga yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan program tersebut.

b. Elit Cendekiawan

Ditinjau dari segi eksistensinya, kelompok elit ini sangat berpengaruh dan disegani oleh banyak kalangan masyarakat. Khususnya kyai, oleh masyarakat setempat selalu menjadi panutan bahkan tidak hanya dalam bidang agama semata, namun dalam segi-segi kehidupan lainnya mereka tetap dianggap sebagai sosok penting, dimintai pendapatnya, dimintai restunya. Berdasarkan pengamatan penulis selama di lapangan, tokoh masyarakat yang ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Apabila diklasifikasikan kyai menempati strata status social yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat desa Wonosari merupakan pemeluk agama islam yang cukup fanatik, tidak mengherankan apabila pemuka agamanya sangat disanjung. Pengaruh yang mereka miliki melebihi kepala desa, pamong desa atau tokoh masyarakat lainnya. Pemerintah desa sendiri selalu datang meminta pertimbangan tentang suatu kebijaksanaan yang hendak dilaksanakan. Bagaimanapun juga restu

dari kyai adalah suatu keharusan kalau ingin mendapat dukungan masyarakat.

Sedangkan tokoh intelektual lainnya seperti halnya guru, juga dipandang sebagai orang berpengaruh. Beberapa individu dari kalangan pendidikan ini mempunyai kepedulian yang besar terhadap pembangunan desa. Kebiasaan mereka adalah melakukan analisa dan kritis terhadap kebijakan pemerintah desa dalam koridor logika atau ilmu pengetahuan. Kebiasaan ini serta merta membuat mereka akrab dengan pemerintah desa, baik itu dengan saran-sarannya, dukungannya, atau bahkan dengan penolakan mereka.

Dalam kaitannya dengan salah satu fokus penelitian di sini, kelompok elit informal cendekiawan memang tidak mempunyai peranan dalam penentuan arah pembangunan desa. Namun sebenarnya keberadaan mereka tetap sangat penting dan menentukan. Keberadaan mereka sebagai salah satu elemen tokoh masyarakat yang paling disegani di lokasi penelitian, menuntut pemerintah desa untuk dapat menjalin kerja sama guna mendapat dukungan atau restu dari kelompok elit informal ini. Maka selanjutnya yang terjadi adalah program atau kebijakan pemerintah desa akan mudah diterima masyarakat sehingga pelaksanaannya tidak akan mengalami pertentangan dengan masyarakat desa.

c. Elit Pemuda

Golongan elit pemuda mempunyai ciri khas semangat kerja keras yang tinggi, dengan kepandaian dan kreativitas yang mereka miliki selalu menghendaki pembaharuan. Gagasan-gagasan baru sering kali lahir dari golongan elit ini sesuai dengan perkembangan jaman. Bentuk pengaruh mereka ditunjukkan dengan prestasi atau kegiatan kemasyarakatan tertentu. Keberadaan mereka tentu akan sangat bermanfaat apabila dapat disalurkan secara tepat dari sekian banyaknya potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Hal ini menuntut adanya pembinaan yang baik dari kalangan yang lebih tua, sebab pada masa usia ini semangat yang cenderung meledak-ledak, kurang disertai perhitungan matang, dan kurangnya pengalaman menjadi titik kelemahan golongan pemuda. Namun

sayangnya, kenyataan yang sering terjadi adalah masyarakat memandang dengan sebelah mata, maksudnya cenderung lebih melihat pada sisi kelemahan mereka saja. Kondisi ini membuat pemerintah desa tidak pernah melibatkan kelompok elit pemuda dalam upaya penentuan arah pembangunan desa.

Fenomena di atas ternyata tidak membuat luntur semangat kelompok elit pemuda di lokasi penelitian. Mereka menempuh jalan lain agar tetap dapat berperan dalam hal penentuan arah pembangunan desa ini. Langkah yang ditempuh adalah dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat tertentu dengan maksud menggalang kepercayaan dari masyarakat. Kepada tokoh masyarakat yang dipilih sebagai *partner*, mereka mengutarakan gagasan secara sederhana kemudian selanjutnya disusul dengan analisa lengkap mengenai latar belakang, kelebihan dan kekurangannya, dan sebagainya dalam bentuk suatu konsep tertulis sebagai bekal kelak untuk dibawa ke dalam forum resmi.

Dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kelompok elit informal pemuda di lokasi penelitian juga mempunyai peranan dalam penentuan arah pembangunan desa. Semangat juang kelompok elit ini patut mendapat apresiasi yang setinggi-tingginya. Hingga saat karya tulis ini disusun, kelompok elit ini masih tetap menggunakan cara yang terbukti jitu ini dengan menggunakan rekanan tetap yaitu Bapak Kyai Khusairi ulama paling disegani di desa Woonosari dan Bapak Ulul Azmi dari kelompok elit informal politik.

d. *Elit Ekonomi*

Di antara beberapa kelebihan yang dimilikinya, seperti kebanyakan kelompok elit ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, di lokasi penelitian pun kelompok elit ini mempunyai kelemahan yang sama. Kelemahan yang sangat mendasar tersebut adalah sikap dan orientasi mereka yang lebih mendahulukan kepentingan dunia usaha/bisnis daripada urusan pemerintahan desa. Dampaknya adalah tingkat kepedulian mereka terhadap kinerja Pemerintah Desa sangat rendah. Dalam hal ini mereka cenderung bersikap apatis dan enggan terlibat, terkecuali dalam

hubungannya dengan perekonomian desa yang secara otomatis tidak dapat dipisahkan dari peranan mereka.

Kecenderungan seperti di atas juga lah yang menjadi faktor penyebab mengapa Pemerintah Desa sangat jarang melibatkan mereka dalam urusan pembangunan desa, seperti dalam bahasan kali ini yaitu penentuan arah pembangunan desa. Disinyalir hal tersebut dilatarbelakangi beberapa usaha yang telah dilakukan Pemerintah Desa dahulu untuk menjaring partisipasi kelompok elit ekonomi tidak menunjukkan respon positif. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat tokoh-tokoh masyarakat yang diselenggarakan pihak Pemerintah Desa adalah merupakan contoh riil bahwa dalam hal ini mereka kurang mempunyai kepedulian. Maka dari sini lah Pemerintah Desa tidak pernah lagi melibatkan kelompok elit ekonomi dalam hal semacam penentuan arah Pembangunan Desa.

Di lain pihak kelompok elit ekonomi menolak jika dikatakan tidak mempunyai kepedulian. Beberapa pernyataan dari nara sumber menyatakan bahwa mereka sebenarnya juga peduli dalam bidang pembangunan desa dan selalu ada hasrat untuk berpartisipasi di dalamnya. Hanya saja ada beberapa faktor yang menjadi penghalang untuk dapat berperan, bahkan salah satu yang menjadi alasan mereka adalah sikap Pemerintah Desa yang tidak melibatkan mereka. Fenomena ini seperti menunjukkan bahwa ada suatu kesalahpahaman antara Pemerintah Desa dengan kelompok elit ekonomi. Keadaan ini seharusnya menjadi koreksi bagi kedua belah pihak mengingat pembangunan adalah beban dan tanggung jawab bersama, yang sudah pasti sangat membutuhkan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, dan bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Desa semata. Apapun yang telah terjadi seharusnya kelompok elit ekonomi ini dapat mencontoh kelompok elit informal yang lainnya, dimana dalam hal penentuan arah pembangunan desa mempunyai peranan. Bagi kelompok elit ekonomi untuk ke depannya diharapkan dapat menjalankan peranannya seperti kelompok elit informal lainnya.

2. Pemecahan permasalahan pembanguna desa

a. *Elit Politik*

Keberadaan kelompok elit politik yang menjadi penyalur aspirasi masyarakat, dalam arti menjadi penghubung atau *mediator* antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, secara otomatis memposisikan mereka menjadi orang-orang dekat Pemerintah Desa. Fakta inilah yang menjadi nilai *plus* kelompok elit politik untuk dapat menjalankan peranannya dalam banyak hal. Ditambah dengan kebiasaan mereka yang sering melakukan dialog baik formal dan non formal, memicu terjadinya konsolidasi dengan Pemerintah Desa. Kondisi ini semakin menancapkan pengaruh mereka yang besar dalam setiap bidang pembangunan desa.

Demikian halnya dalam pemecahan permasalahan pembangunan desa, sebagai pihak terdekat dengan Pemerintah Desa, mereka tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan solusi yang tepat guna sesuai dengan harapan bersama. Dengan berbekal pengetahuan dan keahlian di bidang politik yang mereka miliki, sangat memungkinkan untuk dapat diaplikasikan bersama Pemerintah Desa memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Gambaran peranan elit politik di lokasi penelitian dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi orang dekat Kepala Desa Wonosari, tidak jarang mereka terlihat bersama dalam beberapa kesempatan. Sebagai contoh peran serta mereka adalah ikut andil dalam permasalahan ketika beberapa pedagang kaki lima di sekitar Pasar Desa Wonosari yang menolak dengan dilakukannya relokasi dan penertiban pedagang kaki lima. Berkat peranan mereka permasalahan tersebut dapat diatasi secara damai tanpa menimbulkan konflik antara Aparat Desa dengan pedagang pada waktu itu. Kelebihan lain dari kelompok elit informal politik ini adalah keahlian praktis, yaitu pemecahan permasalahan secara aplikatif melalui tindakan-tindakan nyata menuju terselesaikannya permasalahan tersebut.

b. *Elit Cendekiawan*

Seperti telah disinggung pada bahasan sebelumnya bahwa kelompok elit cendekiawan, terutama ulama, di lokasi penelitian mempunyai pengaruh yang sangat besar, bahkan dapat dikatakan paling besar di antara kelompok elit informal lainnya. Keadaan ini akan sangat menguntungkan bagi Pemerintah Desa karena mempunyai rekanan yang dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan pembangunan desa. Selama ini kelompok elit cendekiawan menjadi senjata andalan Pemerintah Desa apabila terjadi pertentangan dengan masyarakat. Mereka tidak hanya mampu meredam konflik, tetapi juga mampu mempengaruhi masyarakat untuk mendukung Pemerintah Desa.

Fakta di atas adalah salah satu bentuk peranan kelompok elit cendekiawan dalam permasalahan pembangunan desa. Sedangkan yang lebih patut mendapat perhatian adalah peranan mereka sebagai insan intelektual untuk dapat menjawab atau memberi pemecahan terhadap berbagai masalah yang diajukan oleh masyarakat untuk berdiskusi, dan meminta nasihat tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Pencitraan mereka sebagai orang pandai, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas membuat Pemerintah Desa dan masyarakat menjadikan kelompok elit ini sebagai pihak yang diharapkan mampu memberi dan atau menjadi solusi terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Ekspektasi tersebut ternyata berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan, mereka telah menjalankan peranannya dengan baik. Dalam hubungannya dengan Pemerintah Desa, mereka menjadi pihak yang sering sekali dimintai pendapat atau nasehat mengenai permasalahan yang dihadapi. Mereka menyadari bahwa permasalahan pembangunan desa merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan bersama pula, bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Desa semata. Sedangkan dalam hubungannya dengan masyarakat, mereka menjalankan tugasnya menanamkan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan dengan segala macam permasalahannya, sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Berdasarkan gambaran peranan kelompok elit cendekiawan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam bidang ini peranan mereka sangat menonjol. Terlebih lagi kenyataan yang sangat membanggakan yaitu mereka menyadari peran penting mereka dalam pemecahan permasalahan pembangunan desa sangat dibutuhkan, baik oleh Pemerintah Desa maupun oleh masyarakat desa.

c. *Elit Pemuda*

Organisasi kepemudaan atau karang taruna di lokasi penelitian merupakan wadah untuk menyalurkan peranan kelompok elit pemuda. Mereka adalah sekumpulan pemuda Desa Wonosari saat ini dengan jumlah anggota 54 orang, usia minimal 17 tahun dan yang paling senior saat ini berusia 26 tahun. Rata-rata usia mereka adalah 20 tahun. Seluruh anggota karang taruna tersebut saat ini masih berstatus sebagai pelajar, baik SMU/ sederajat dan mahasiswa, hanya ketua yang penulis pilih sebagai nara sumber, yaitu Saudara Gagut Agus, yang telah menjadi sarjana.

Dengan keadaan tersebut akan sangat sulit untuk dapat berperanan dalam pemecahan permasalahan pembangunan desa, sebab dari segi usia mereka masih terlalu muda untuk dilibatkan dalam *event* sepenting itu. Hal ini disadari sepenuhnya oleh mereka dengan tidak memaksakan diri terlibat di dalamnya, dengan rasa hormat mereka menaruh kepercayaan penuh kepada Pemerintah Desa setempat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Setidaknya fenomena tersebut melatarbelakangi tidak adanya peranan kelompok elit pemuda dalam bahasan kali ini.

Dari pihak Pemerintah Desa sendiri memang tidak pernah melibatkan kelompok elit pemuda, sebab dalam hal ini Pemerintah Desa lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan kelompok elit informal lainnya yang dianggap lebih berpengalaman mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat menyayangkan kenyataan yang terjadi, bahwa hanya karena faktor usia yang relatif muda, asumsi masyarakat masih sangat kental yaitu anggapan kurangnya pengalaman

yang mereka miliki. Padahal apabila dilihat dari segi kemampuan dan kepandaiannya, mereka ini sangat bisa dibanggakan, dan bagaimanapun juga mereka-mereka inilah generasi penerus di masa mendatang. Maka alangkah baiknya apabila sejak usia muda sudah dibiasakan atau dilatih untuk ikut serta dalam pemecahan permasalahan pembangunan desa seperti ini. Sejatinya besarnya potensi mereka ini yang harus disadari Pemerintah Desa dan masyarakat, sedangkan mengenai persoalan minimnya persoalan dapat ditutupi dengan bimbingan dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

d. *Elit Ekonomi*

Kelemahan kelompok elit ekonomi seperti yang terjadi pada bahasan sebelumnya, juga masih berlanjut pada bahasan kali ini. Dalam hal pemecahan permasalahan pembangunan ini mereka juga tidak menjalankan peranannya sama sekali. Sikap apatis dan keengganan terlibat dari kelompok elit ini masih menjadi penyebab utama ketidakharmonisan hubungan kerja sama antara mereka dengan Pemerintah Desa. Dampaknya memicu terjadinya fenomena klasik yaitu Pemerintah Desa tidak melibatkan kelompok elit ekonomi dalam masalah ini.

Kelompok elit ekonomi sendiri dapat tergambar dari pernyataan-pernyataan nara sumber bahwa memang mereka tidak menginginkan untuk ikut campur atau terlibat dalam pemecahan permasalahan pembangunan ini. Mereka mempunyai pemahaman bahwa tanpa mereka pun, masih ada kelompok elit informal lainnya di Desa Wonosari yang mempunyai kemampuan dan pengaruh yang besar menjadi rekanan Pemerintah Desa untuk mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Indikasi lain memperlihatkan bahwa kelompok elit ekonomi tidak dianggap sebagai pihak yang tepat untuk diajak kerja sama dengan Pemerintah Desa mengenai masalah ini.

Selanjutnya jelaslah gambaran kenyataan di lapangan bahwa kelompok elit ekonomi di lokasi penelitian tidak mempunyai peranan dalam pemecahan permasalahan pembangunan desa. Poin penting yang harus menjadi perhatian di sini adalah bagaimana upaya selanjutnya yang

harus ditempuhagar dalam hal ini terjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan kelompok elit ekonomi. Di satu sisi Pemerintah Desa berkenan untuk menjalin komunikasi sebagai *stimulus* kerja sama lanjutan dengan kelompok elit ekonomi. Begitu juga dengan pihak kelompok elit ekonomi agar berkenan introspeksi diri atas kekurangan yang biasa mereka lakukan selama ini, sekaligus berusaha memperbaikinya agar dapat lebih berperan dalam berbagai aspek pelaksanaan pembangunan desa, tidak hanya terbatas dalam bidang perekonomian semata yang biasa mereka lakukan selama ini.

3. Pelaksanaan kegiatan desa

a. *Elit Politik*

Kelompok elit politik adalah orang-orang dengan keahlian khusus, berjiwa pemimpin, mampu mempengaruhi orang lain, serta ahli dalam hal menelurkan konsep-konsep jitu sebagai cikal bakal dan garis besar dalam pelaksanaan pembangunan. Kontribusi mereka dalam bidang penentuan arah tidak diragukan lagi, mereka menjalankan peranan sebagai agen penentu dengan sangat baik. Namun apabila kondisi tersebut dikaitkan dengan pelaksanaannya, ternyata yang sering kali terjadi adalah berbanding terbalik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian hasil penelitian, bahwa yang dimaksud pelaksanaan kegiatan desa di sini adalah proses berlangsungnya suatu program, acara, atau perhelatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dari sejak awal hingga akhir pencapaian maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain dapat dikhususkan di sini yaitu sejauh mana keterlibatan atau partisipasi kelompok elit informal, termasuk kelompok elit politik selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan para nara sumber dari kelompok eli politik, membuka fakta bahwa mereka hanya terlibat pada saat perencanaannya, atau dapat dikatakan sebagai konseptor saja. Dan kebiasaan ini berlangsung hingga kini dalam beberapa praktek kegiatan

desa. Sedangkan pada saat pelaksanaannya ternyata sama sekali tidak ada partisipasi dari mereka. Kelompok elit politik di lokasi penelitian seakan-akan menspesialisasikan keahlian mereka hanya dalam bidang konseptual tersebut, akibatnya muncul keengganan untuk terlibat selama dalam pelaksanaan kegiatan desa. Fenomena ini dibenarkan sendiri oleh sebagian dari mereka melalui pernyataan-pernyataan dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada saat penelitian. Selanjutnya dampak dari perilaku kelompok elit politik tersebut muncullah persepsi di kalangan masyarakat yang menilai bahwa mereka arogan yang tidak mau melibatkan diri dalam pelaksanaan suatu kegiatan desa, sebagai penasehat non teknis adalah posisi yang mereka inginkan.

Gambaran fenomena di lapangan tersebut memberikan kesimpulan bahwa kelompok elit politik tidak mempunyai peranan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Hal tersebut menjadi titik kekurangan yang harus diperbaiki. Alangkah baiknya seandainya keahlian atau kemampuan mereka dapat disalurkan pula dalam bentuk partisipasi riil bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari dilaksanakannya suatu kegiatan desa dapat terealisasi dengan hasil yang lebih maksimal.

b. *Elit Cendekiawan*

Status sosial kelompok elit cendekiawan di lokasi penelitian adalah sebagai tokoh masyarakat yang paling dihormati, dan menjadi panutan dalam segi-segi kehidupan masyarakat desa. Keadaan ini praktis menuntut kelompok elit cendekiawan senantiasa berperilaku layaknya orang terhormat dengan maksud memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Berawal dari contoh-contoh yang baik tersebut diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk mengikuti jejak panutan mereka, yaitu turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan desa. Di samping mereka menjalankan partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan desa, peran sebagai *motivator* berjalan dengan baik di lokasi penelitian.

Secara praktis dalam pelaksanaannya kelompok elit cendekiawan selalu terlibat dalam susunan kepenitaaan yang dibentuk oleh Pemerintah

Desa sebagai penyelenggaranya, baik itu tergabung dalam jajaran pengawas maupun pelaksana teknisnya. Apabila berada pada posisi pengawas, pengaruh kharismatik yang mereka miliki mampu mempengaruhi kinerja panitia pelaksanaan teknis menjadi lebih optimal karena segan terhadap mereka, sehingga tidak berani bekerja dengan asal-asalan. Sedangkan bila termasuk dalam pelaksana teknis, mereka tentunya akan bekerja sebaik-baiknya untuk memberi contoh kepada rekan-rekan setim yang lainnya. Pengalaman mereka yang luas akan menjadi nilai *plus* tersendiri apabila diaplikasikan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan kegiatan desa. Kemampuan dan pengaruh besar kelompok elit cendekiawan ini sangat disadari betul oleh Pemerintah Desa, maka dari itu tokoh masyarakat yang paling berpengaruh ini selalu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa, baik itu partisipasi langsung mereka selama pelaksanaan maupun peran mereka sebagai *motivator* yang bertugas membangkitkan partisipasi masyarakat desa. Dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok elit cendekiawan di lokasi penelitian mempunyai peranan dalam pelaksanaan kegiatan desa.

c. *Elit Pemuda*

Menilik pada tujuan pembentukannya, organisasi yang merupakan saluran pengaruh kelompok elit pemuda, adalah dimaksudkan sebagai wadah untuk mengorganisir semua potensi dan kreatifitas positif para pemuda di desa, menunjang pelaksanaan kegiatan desa. Oleh sebab itu kelompok elit pemuda ini selalu menjadi aktor utama yang menjalankan peran sentral dalam pelaksanaan kegiatan desa. Dalam bidang inilah peranan kelompok elit pemuda dapat dilaksanakan secara maksimal.

Mengenai pelaksanaan teknisnya dilapangan, kelompok elit pemuda tersebar dalam keanggotaan panitia kegiatan tertentu, tidak jarang ketua pelaksana terpilih dari golongan mereka. Di lokasi penelitian, ketika menangani suatu *event* atau kegiatan, mereka diberikan otonomi dan kepercayaan penuh untuk menjalankan perannya, kebebasan berkreatifitas dan mengaplikasikan gagasan yang sifatnya inovatif, terutama dengan kerja sama dan bimbingan elemen masyarakat lainnya.

Keterlibatan dan partisipasi aktif mereka ini memang sangat dibutuhkan Pemerintah Desa sebagai kepanjangan tangannya, dalam arti keberadaan mereka memberikan garansi selalu adanya kesanggupan menangani kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Pemerintah Desa. Sehingga bagi pihak Pemerintah Desa memperoleh rasa aman bahwa ada suatu elemen dalam masyarakat yang dapat diandalkan, sementara dengan penuh semangat dan tulus ikhlas melaksanakan kegiatan desa tersebut.

Beberapa keberhasilan kelompok elit pemuda melaksanakan kegiatan desa dengan hasil yang dapat dibanggakan, semakin menanamkan kepercayaan Pemerintah Desa dan masyarakat kepada kelompok elit ini. Selanjutnya setiap kali ada kegiatan desa, tidak pernah jauh dari keterlibatan mereka sebagai pelaksananya. Bentuk nyata kesuksesan mereka dalam menangani pelaksanaan kegiatan desa adalah ketika menangani kegiatan tahunan desa yang saat itu bertajuk “*Grebeg Memetri Desa. Kelawan Ati kang Luhur Tinuju Desa kang Makmur*” pada tahun 2007. berkat kreatifitas rekan-rekan pemuda, kegiatan yang semula hanya ritual tahunan biasa dikemas secara artistik dalam bentuk kegiatan pesta rakyat dan pesta budaya. Perjuangan mereka menuai hasil yang membanggakan dengan ditetapkannya agenda tersebut dalam kalender wisata Jawa Timur. Prestasi tersebut sampai terdengar di Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang kemudian mengundang pengurus organisasi pemuda *Nongkojajar Youth* ke Dinas Pariwisata Jawa Timur pada 1 September 2007. Pada saat itu Saudara Gagut Agus selaku ketua dianugerahi gelar sebagai “Pemuda Pelopor” karena keberhasilannya memimpin rekan-rekannya menjadi organisasi kepemudaan yang berprestasi.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tersebut jelaslah sudah bahwa kelompok eli pemuda di lokasi penelitian mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan kegiatan desa.

d. *Elit Ekonomi*

Kelemahan kelompok elit pemuda seperti pada kedua bahasan sebelumnya, sekali lagi masih terbawa pada pelaksanaan kegiatan desa.

Sikap dan perilaku tidak peduli yang memilih tidak melakukan peranan oleh kelompok elit ekonomi tersebut, kali ini ditambah dengan alasan keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan desa. Sudah menjadi ciri khas golongan elit ini bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan dunia usaha yang mereka jalankan daripada meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan tertentu. Sehingga tidak dapat dihindari kemudian muncullah *image* yang terbentuk di kalangan Pemerintah Desa dan masyarakat pada diri kelompok elit ekonomi sebagai golongan yang *egois*.

Sebagian dari kelompok elit ekonomi menyatakan bersedia terlibat dalam pelaksanaan kegiatan desa. Hanya saja hal tersebut terjadi apabila yang dilaksanakan adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya untuk beridealis seperti itu tidaklah sepenuhnya salah, karena memang sebenarnya dalam dunia itulah mereka sangat berkompeten. Namun akan lebih baik lagi apabila peranannya dapat dilakukan pada bidang-bidang pembangunan desa yang lainnya, karena bagaimanapun juga Pemerintah Desa sangat membutuhkan kerja sama dan partisipasi dari banyak pihak.

Berdasarkan pengamatan penulis selama berada di Desa Wonosari, dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kelompok elit ekonomi di lokasi penelitian tidak mempunyai peranan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Kesimpulan tersebut diambil setelah penulis tidak mendapatkan data-data mengenai suatu kegiatan tertentu yang mana menyatakan adanya keterlibatan kelompok elit ekonomi di dalam pelaksanaannya, serta diperkuat dengan pernyataan-pernyataan nara sumber dari kelompok elit ekonomi dimana mereka mengakui dengan terbuka bahwa mereka tidak melakukan peranan tertentu dalam hal ini.

4. Bantuan material elit informal

a. Elit Politik

Berdasarkan pengamatan penulis selama berada di lokasi penelitian, terdapat sedikitnya 10 orang yang berkecimpung dalam dunia politik

praktis. Mereka masuk dalam keanggotaan suatu partai politik tertentu, menjabat sebagai pengurus anak cabang dan pengurus ranting. Keseluruhan dari kelompok elit politik di Desa Wonosari tersebut dapat dikategorikan ke dalam golongan masyarakat menengah ke atas dari segi tingkat ekonominya. Paling tidak hal tersebut tercermin dari kepemilikan unit mobil pribadi, cara berpakaian dan bersikap, serta gaya hidup lainnya yang berkecukupan.

Dari keadaan tersebut sangat memungkinkan kelompok elit politik untuk berkemampuan memberikan bantuan material dalam pembangunan desa. Hal tersebut berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan bahwa mereka bersedia memberikan bantuan material tertentu, atau yang lebih sering dilakukan adalah dalam bentuk uang tunai sejumlah tertentu. Pada dasarnya hampir semua masyarakat setempat melakukan peranan ini, sebab Pemerintah Desa Wonosari memberlakukan pungutan swadaya masyarakat kepada setiap Kepala Keluarga sebesar Rp. 10.000,- per bulan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa, terdapat pengecualian dan pembebasan pungutan swadaya tersebut kepada keluarga yang tergolong tidak mampu. Terlepas dari kewajiban pembayaran pungutan swadaya tersebut, sebagian besar dari kelompok elit politik, khususnya yang penulis pilih sebagai nara sumber terkenal dermawan di kalangan masyarakat sekitar.

Selain peranan mereka di atas, ada poin *plus* yang patut diberikan kepada kelompok elit politik. Hal ini didasari adanya peranan tambahan yang mereka lakukan, yaitu sebagai *motivator* bagi masyarakat agar mau berpartisipasi melakukan upaya swadaya masyarakat untuk menunjang pembangunan desa. Mekanismenya sangat sederhana, dengan memberikan contoh melalui pemberian bantuan material secara pribadi dalam jumlah tertentu, lantas dilanjutkan dengan mengajak masyarakat yang lainnya untuk ikut berpartisipasi sehingga upaya swadaya dalam kegiatan pembangunan yang dimaksudkan dapat terlaksana. Peranan yang mereka lakukan ini sangat membantu Pemerintah Desa dalam hal pembiayaan suatu pembangunan desa.

b. *Elit Cendekiawan*

Apabila ditinjau dari tingkat ekonominya, sebenarnya sebagian besar kelompok elit cendekiawan di lokasi penelitian termasuk dalam kategori masyarakat menengah, sebagian lainnya dari mereka tergolong kaya. Namun kenyataan di lapangan ternyata menunjukkan bahwa mereka juga melakukan peranan dengan memberikan bantuan material dalam pembangunan desa.

Ada dua hal di sini yang dapat dicermati mengenai peranan kelompok elit cendekiawan. Pertama, didasari fakta seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan kelompok elit politik sebelumnya, yaitu Pemerintah Desa setempat memberlakukan pungutan swadaya masyarakat setiap bulannya. Sebagai warga desa setempat yang patuh terhadap peraturan Pemerintah Desa tentu mereka diwajibkan memenuhinya, karena mereka tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin yang mendapat dispensasi pembayaran pungutan swadaya tersebut. Dan yang kedua, status sosial mereka dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang dianggap terhormat, serta selalu menjadi panutan bagi masyarakat desa mendorong mereka memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Sama halnya dengan kelompok elit politik sebelumnya, kelompok elit cendekiawana di sini juga menjalankan peranan sebagai *motivator* untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya sebagai *motivator* ini dilakukan dengan baik, terbukti dengan adanya pembangunan fisik di wilayah desa setempat yang berasal dari swadaya masyarakat hasil upaya kelompok elit ini. Kekuatan pengaruh dan kedekatan hubungan dengan masyarakat adalah kunci sukses mereka menjalankan peranan ini.

c. *Elit Pemuda*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kelompok elit pemuda di lokasi penelitian masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, dan hanya sebagian kecil saja yang mempunyai penghasilan sendiri secara tetap. Dengan status pelajar atau mahasiswa ini otomatis mereka menggantungkan pemenuhan kebutuhannya dari orang tua masing-

masing. Sehingga kepada mereka-mereka ini tentunya tidak dapat dituntut untuk melakukan peranan di sini. Secara normatif fenomena ini sangat disadari di kalangan masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang telah mempunyai penghasilan, biasanya partisipasinya juga masih diwakili orang tuanya, seperti dalam kewajiban membayar pungutan swadaya oleh Pemerintah Desa, karena pungutan tersebut hanya diberlakukan kepada Kepala Keluarga saja.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok elit pemuda di lokasi penelitian tidak melakukan peranan memberikan bantuan material dalam pembangunan desa.

d. Elit Ekonomi

Sudah dapat diketahui dari julukannya sebagai kelompok elit ekonomi, maka sudah pasti mereka ini adalah golongan orang-orang kaya. Di lokasi penelitian jumlah mereka tergolong banyak, bahkan beberapa di antaranya tergolong sangat kaya, termasuk salah satunya yang penulis pilih sebagai nara sumber. Memang tidak semua dari mereka diakui dermawan oleh masyarakat desa setempat, tetapi setidaknya sebagian besar dari mereka tergolong dermawan.

Apabila dalam fokus penelitian yang lain kelompok elit ekonomi tidak melaksanakan peranannya dan terdapat sisi-sisi kelemahannya yang mengisi pembahasan di dalamnya, maka dalam fokus penelitian kali ini peranan mereka relatif paling besar daripada kelompok elit informal lainnya. Akibat kekayaan dan kedermawanan mereka di sini yang membuat peranan mereka sangat besar dalam memberikan bantuan material dalam pembangunan desa. Berdasarkan data-data dan kenyataan di lapangan menunjukkan bantuan material yang mereka berikan sering kali dalam jumlah yang relatif besar. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang tertentu. Hal ini akan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan desa. Bantuan material dalam jumlah besar yang diterima Pemerintah Desa dari kelompok elit ekonomi setempat, memungkinkan proyek-proyek besar

dapat dilaksanakan tanpa harus mengandalkan bantuan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

Sifat kedermawanan dan peran besar kelompok elit ekonomi dalam bidang ini sekaligus menjadi sisi kelebihan yang mampu menutupi kelemahan mereka dalam bidang lainnya. Apabila dalam bidang yang lainnya terdapat ketidakharmonisan kerja sama antara mereka dengan Pemerintah Desa, maka dalam bidang ini mereka mampu menjadi rekanan yang dapat diandalkan perannya oleh Pemerintah Desa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam hal penentuan arah pembangunan desa, kelompok elit informal politik menjalankan peranannya dengan sangat baik, mempunyai keterlibatan langsung dan proaktif hingga lahirnya suatu program atau kebijakan desa. Kelompok elit informal cendekiawan tidak mempunyai peranan, namun keberadaan mereka sangat penting dan menentukan terlaksanakannya suatu program atau kebijakan desa. Kelompok elit informal pemuda melakukan peranannya dengan baik, berbekal semangat juang dan kerja keras berupaya dapat berperanan dengan menggandeng kelompok elit informal lainnya sebagai rekanan. Kelompok elit informal ekonomi tidak menjalankan peranannya, sikap tidak peduli menjadi alasan tidak berperanan, dan menjadi sebab mengapa Pemerintah Desa tidak melibatkan kelompok elit informal ekonomi.
2. Dalam hal pemecahan permasalahan pembangunan, kelompok elit informal politik berperanan dengan baik, hubungan dekat dengan Pemerintah Desa sangat memungkinkan kerja sama di sini. Kelompok elit informal cendekiawan melakukan peranannya dengan sangat baik, melalui keahlian dan intelektualitas yang dimiliki mampu memberi solusi kepada Pemerintah Desa, serta menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan masyarakat. Kelompok elit informal pemuda tidak mempunyai peranan, mereka tidak dilibatkan sebab dengan usia muda seperti mereka dianggap kurang berpengalaman sehingga belum saatnya terlibat dalam *event* terpenting ini. Kelompok elit informal ekonomi juga tidak berperanan, sikap tidak peduli tetap menjadi kekurangan sehingga memicu ketidakharmonisan hubungan antara mereka dengan Pemerintah Desa.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, kelompok elit informal politik tidak melakukan peranan, mereka hanya terlibat pada saat penyusunan konsep saja, bahkan muncul kesan di kalangan masyarakat tentang arogansi mereka yang enggan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan desa. Kelompok

elit informal cendekiawan menjalankan peranan dengan baik, status sosial sebagai tokoh masyarakat yang paling dihormati membuat mereka selalu dilibatkan, serta bertindak sebagai *motivator* bagi pelaksana yang lainnya. Kelompok elit informal pemuda mempunyai peranan yang sangat besar, menjadi aktor utama yang menjalankan peran sentral selama pelaksanaan kegiatan. Kelompok elit informal ekonomi tidak mempunyai peranan, kekurangan yang ada pada bagian-bagian sebelumnya juga terjadi di sini ditambah dengan dalih keterbatasan waktu karena lebih mementingkan dunai usaha/bisnis.

4. Dalam hal pemberian bantuan material pembangunan, kelompok elit informal politik melakukan peranannya dengan baik sebab mereka tergolong masyarakat mampu, serta menjalankan peran tambahan sebagai *motivator* yang menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kelompok elit informal cendekiawan juga menjalankan peranannya dengan baik, termasuk kategori masyarakat menengah, dan dengan kekuatan pengaruhnya juga berperanan sebagai *motivator* seperti kelompok elit informal politik. Kelompok elit informal pemuda tidak mempunyai peranan, sebab sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, dan belum mempunyai penghasilan tetap. Kelompok elit informal ekonomi menjalankan peranan paling besar di antara kelompok elit informal lainnya, sifat dermawan dan kekayaan yang dimiliki menjadi modal utama peranan besar mereka.
5. Pelaksanaan pembangunan di Desa Wonosari cenderung lebih mengarah pada pembangunan fisik yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Hal ini berdasarkan gambaran pos anggaran pengeluaran dalam bidang fisik sanga jauh melebihi pembangunan non fisik. Pembangunan fisik yang dilaksanakan hingga saat ini diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung pencanangan program Desa Wisata Wonosari “MEKAR”.

B. SARAN

1. Dalam hal penentuan arah pembangunan desa. Kepada Pemerintah Desa agar lebih menyadari kemampuan dan pengaruh besar kelompok elit informal cendekiawan, dan dengan kelompok elit informal ekonomi berkenan memperbaiki hubungan kerja sama dalam bidang ini. Tentunya hasil yang diperoleh dalam penentuan arah pembangunan desa akan lebih maksimal seandainya melibatkan semua elemen elit informal di desa. Seringnya mengadakan dialog atau berdiskusi akan lebih memepererat hubungan dengan elit-elit tersebut.
2. Dalam hal pemecahan permasalahan pembangunan desa. Kepada Pemerintah Desa agar tidak lagi memandang sebelah mata keberadaan dan potensi kelompok elit informal pemuda, sebab kreatifitas dan gagasan baru yang inovatif sering muncul dari mereka. Dalam pelaksanaannya tetap disandingkan dengan kelompok elit informal lainnya untuk menutup di sisi kelemahan yaitu kurangnya pengalaman. Terhadap kelompok elit informal ekonomi, untuk menumbuhkan partisipasinya dapat melibatkan kelompok elit informal cendekiawan yang mempunyai pengaruh sangat besar.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan desa. Kepada kelompok elit informal politik supaya megurangi arogansinya agar dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berpartisipasi di dalamnya, sebab sebaik apapun konsep tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa disertai pelaksanaan yang baik pula. Dalam pelaksanaannya tergabung dalam kepanitiaan suatu kegiatan tertentu pada jabatan-jabatan strategis yang menentukan proses pengambilan keputusan secara bijaksana.
4. Dalam upaya memberikan bantuan material pembangunan desa. Kepada kelompok elit informal pemuda memang tidak memiliki kewajiban moral dalam hal ini, namun sebaiknya dapat menjalankan peranan dalam bentuk lainnya yangmana nantinya dapat menunjang tersedianya bantuan material dari masyarakat. Tindakan konkret yang dapat mereka lakukan adalah dengan membantu Pemerintah Desa pada saat penarikan pemungutan swadaya masyarakat, dengan kuantitas personel yang banyak akan

menimbulkan efektifitas dan efisiensi waktu pengumpulan pungutan swadaya masyarakat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1990. *Masalah dan Prospek Pembangunan Indomesia*. Jakarta: Gramedia.
- Asy 'ari, Imam Sapari. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, Abdillah. 1987. (Disarikan dari Rogers Everet, N dan Shoemaker Floyd, F). *Memasyarakatkan Ide-Ide baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Pembangunan Berkesinambungan dan Berkeadilan dalam PJP II*. Malang: FIA Unibraw.
- Keller, Suzenne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairuddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Koentjaraningrat. 1994. *Mentalitas dan Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Marbun, B. N. 1988. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, B. Mathew, dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Rohidi Rohendi Tjetjep. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarinein. 1996. *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Morfologi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Schoorl, J. W. 1988. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Terjemahan Soekandijo G. R.. Jakarta: Gramedia.

Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Cetakan 11, PT. Gunung Agung.

_____. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada.

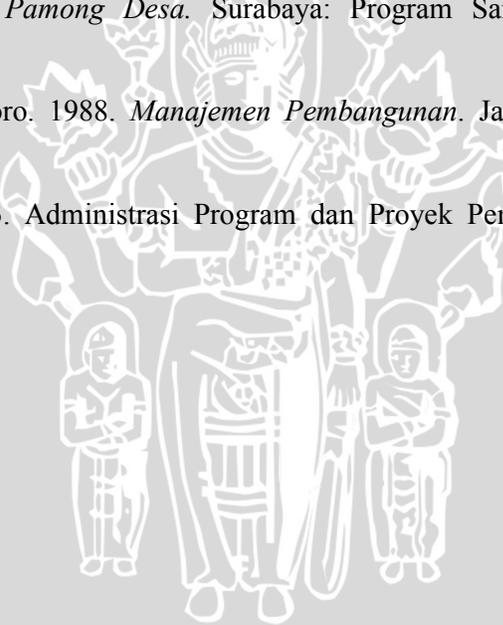
Soeprapto, Riyadi. *Elit, Pembangunan dan Reformasi Administrasi di Era Orde baru*. (Makalah: "Kuliah Tamu" FIA Unibraw Malang, 8 April 1997). Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Soewignjo. 1985. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumartono. 1996. *SKRIPSI, Peralihan Status Sosial Elit di Pedesaan, Suatu Kajian Tentang Pola dan Karakteristik serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit Pamong Desa*. Surabaya: Program Sarjana Universitas Airlangga.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. IKIP Malang.



CURRICULUM VITAE

Nama : Indra Kurniawan
NIM : 0110310043
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 9 Oktober 1983
Pendidikan : - SD Negeri Made III Lamongan Tamat tahun 1995
- SMP Negeri 1 Lamongan Tamat tahun 1998
- SMU Darul Ulum 2 Jombang Tamat tahun 2001
- S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Tamat tahun 2008

